# PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

# RENCANA KERJA
# (RENJA)
# BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
# KABUPATEN SERUYAN
# TAHUN 2024

**Badan Keuangan Dan Aset Daerah**
Jalan Akhmad Yani No. 01 Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
Telepon (0538) 2022422, Faks. (0538) 2022422
Website : https://bkad.seruyankab.go.id/

# BUPATI SERUYAN
# PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
## NOMOR 100.3.3.2/ 235 /2023

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024**

**BUPATI SERUYAN,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

16. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10);

17. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 15).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

**KEDUA** : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024;

**KETIGA** : Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
BAB V : PENUTUP

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 7 Agustus 2023

**BUPATI SERUYAN,**

**YULHAIDIR**

**LAMPIRAN**
**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN**
**NOMOR 100.3.3.2/ 235 /2023**
**TANGGAL 7 Agustus 2023**
**TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024**

| NO | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|
| *1* | *2* |
| 1 | Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan |
| 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan |
| 4 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan |
| 5 | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan |
| 6 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan |
| 8 | Dinas Sosial Kabupaten Seruyan |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan |

| NO | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan |
| 11 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan |
| 14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan |
| 15 | Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan |
| 16 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan |
| 17 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan |
| 18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan |
| 19 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan |
| 20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan |
| 21 | Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan |

| NO | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 22 | Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan |
| 23 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan |
| 24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan |
| 25 | Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan |
| 26 | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan |
| 27 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan |
| 28 | Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan |
| 29 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan |
| 30 | Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan |
| 31 | Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan |
| 32 | Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan |
| 33 | Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan |

| NO | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 34 | Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan |
| 35 | Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan |
| 36 | Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan |
| 37 | Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan |
| 38 | Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan |
| 39 | Kecamatan Suling Tambun Kabupaten Seruyan |

BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR

**LAMPIRAN**
**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN**
**NOMOR 100.3.3.2/235/2023**
**TANGGAL 7 AGUSTUS 2023**
**TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**
**TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH: 25. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
Jl. Akhmad Yani Nomor 1 Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
Telepon (0538) 2022424 Faximile (0538) 2022424

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SERUYAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR 900/ 43 / SK.BKAD-I/VIII/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SERUYAN,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/235/2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan;

b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan nomor 69);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

16. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 15);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2024;**

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024;

KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 yang telah ditetapkan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 16 Agustus 2023

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**MEGAWATI, S.E.,M.A.P.**
**NIP. 19790527 200604 2 012**

## KATA PENGANTAR

*Bismilahirohmannirrohim*

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas ridho dan perkenanNya kami bisa menyelesaikan Rencana Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024. RENJA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan pencapaian visi misi Kabupaten Seruyan sekaligus sebagai pedoman penyusunan Anggaran Badan Keuangan Dan Aset Daerah serta merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di BKAD dengan tujuan :

1. ***Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel; dan***
2. ***Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintahan.***

RENJA Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 mencakup 3 program 14 Kegiatan 108 sub kegiatan sesuai dengan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Renja BKAD Tahun 2024 merupakan dasar untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya akan disusun menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024.

Akhirnya semoga Allah SWT, selalu memberikan kemudahan terhadap semua kegiatan yang kita laksanakan, Amin.

Kuala Pembuang, Agustus 2023

**KEPALA BADAN KEUANGAN**
**DAN ASET DAERAH,**

**MEGAWATI, S.E., MAP.**
**NIP. 19790527 200604 2 012**

## DAFTAR ISI

| | | Halaman |
|---|---|---|
| KATA PENGANTAR | | i |
| DAFTAR ISI | | iii |
| DAFTAR TABEL | | iv |
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | 1.1. Latar belakang | 1 |
| | 1.2. Landasan hukum | 3 |
| | 1.3. Maksud dan tujuan | 7 |
| | 1.4. Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II | HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | 10 |
| | 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu | 10 |
| | 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 30 |
| | 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 52 |
| | 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD | 55 |
| | 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 87 |
| BAB III | TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 97 |
| | 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | 97 |
| | 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah | 97 |
| BAB IV | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 100 |
| | 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah | 100 |
| BAB V | PENUTUP | 159 |

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan ..... 51
Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 52
Tabel 3 Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 terhadap analisis kebutuhan..... 56
Tabel 4 Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah ..... 99
Tabel 5 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024DAN PRAKIRAAN MAJU 2025..... 110
Tabel 6 PEMETAAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DENGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA KEPMENDAGRI NOMOR : 9001.15.5-1317..... 132
Tabel 7 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025..... 141

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam prosesnya penyusunan RENJA SKPD dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan RKPD dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi SKPD, evaluasi Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian RENSTRA SKPD. Renja SKPD memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta berpedoman pada RENSTRA SKPD. Renja SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah disusun berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana

Strategis SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam Menyusun Renja SKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, perkiraan maju serta penyelarasan program dan kegitan sesuai skala prioritas target Renstra SKPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD. Mengingat arti strategis Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Renja mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

a. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun berjalan dan mengacu pada RKPD Tahun tahun berjalan;
b. Program dan Kegiatan dalam Renja disusun dengan berpedoman pada RENSTRA Perangkat Daerah;
c. Program dan Kegiatan dalam Renja selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kabupaten;
d. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 dilakukan melalui proses teknokratis dan partisipatif dengan mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan, proses top-down dan proses bottom-up secara berjenjang berdasarkan

hasil Forum Perangkat Daerah dan selanjutnya disinergiskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja BKAD Tahun 2024 merupakan:

1. Pedoman bagi BKAD dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024;
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.
3. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan basis data KUA-PPAS tahun 2024 yang memuat arah kebijakan Pemerintah selama satu tahun.

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4786);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik indanesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangun Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 23);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
23. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10).

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan adalah :

1. Memberikan informasi tentang rencana program dan kegiatan tahunan;
2. Sebagai panduan dalam mengevaluasi/monitoring pelaksanaan capaian realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tahun lalu ;
3. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
4. Perkiraan capaian kinerja tahun berjalan serta perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan adalah :

1. Merencanakan dan Menyusun kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2024;
2. Melakukan Evaluasi Renja Tahun berjalan;
3. Mengukur dan menilai kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan sebagai sebuah Lembaga yang melaksanakan fungsi

sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Seruyan secara umum, dan kinerja bidang bidang pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan secara khusus;

4. Mempertajam dan memperjelas skala prioritas rencana kegiatan dan sub kegiatan yang memuat indikator dan tolak ukur kinerja serta kebutuhan dana/pagu definitif Tahun Anggaran 2024 dan prakiraan maju 2025.

## 1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V PENUTUP**

# BAB II

# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi SKPD tahun 2022 dan pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sejauh mana komitmen, kemampuan dan hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasikan pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan prakiraan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) tahun berjalan. Berdasarkan hal tersebut maka akan dilakukan evaluasi kegiatan yang menjadi kewenangan pada BKAD Kabupaten Seruyan yaitu Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun Anggaran 2022 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2018 – 2023, Rencana Strategis BKAD Kabupaten Seruyan Tahun 2013-2018, serta Tugas Pokok dan Fungsi BKAD Kabupaten Seruyan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Keuangan dan Aset Daerah.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 dan pencapaian Renstra 2018-2023 diperlukan sebagai dasar penyusunan Renja Tahun 2024. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan BKAD dimaksud dapat dilihat

berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Rencana Keja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan dan Aset Daerah. Renja BKAD juga menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022. Secara umum hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja BKAD berdasarkan Rekapitulasi Hasil evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2021 (n-2) dan pelaksanaan RENJA Tahun Anggaran 2022 (n-1) sampai dengan Triwulan IV sebagai berikut :

***Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2021 (n-2) sebagai berikut:***

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Kinerja *Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran* yang terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan yaitu :
   1). Kegiatan Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :
      a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 14.585.000,- teralisasi sebesar Rp. 4.738.000 atau sebesar 32%
      b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan pagu sebesar Rp. 9.672.500,- terealisasi sebesar Rp. 6.504.500,- atau sebesar 67%

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan pagu sebesar Rp. 8.920.000,- dengan realisasi 0%

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.720.000,- terlisasi sebesar Rp 3.240.000,- atau sebesar 37%

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan pagu sebesar Rp. 9.695.000,- terealisasi sebesr 0 %

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 22.599.808,- terealisasi sebesar Rp. 10.164.824,- atau sebesar 45%

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.570.000,-terealisasi sebesar Rp. 4.517.500,- atau sebesar 47%.

2). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.372.243.240,- terealisasi sebesar Rp. 4.233.373.828,- atau sebesar 79%

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 912.810.000,- terealisasi sebesar Rp. 629.540.000,- atau sebesar 69%.

c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 42.519.616,- terealisasi sebesar Rp. 12.916.324,- atau sebesar 30%

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.295.000,- terealisasi sebesar 0%

e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.880.000,- terealisasi sebesar 0%

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp. 10.945.000,- terealisasi sebesar 0%

3). Kegiatan Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.642.500,- terealisasi sebesar 0%

b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.620.000,- terealisasi sebesar 0%

c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.295.000,- terealisasi sebesar 0%

d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.500.000,- terealisasi sebesar 0%

e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.302.000,- terealisasi sebesar 0%

f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.784.000,- terealisasi sebesar 0%

g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.250.000,- terealisasi sebesar 0%

4). Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.329.616,- terealisasi sebesar Rp. 12.179.808,- atau sebesar 48%

b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.750.000,- terealisasi sebesar 0%

c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 598.358.000,- terealisasi sebesar Rp. 163.105.700,- atau sebesar 27%

5). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.650.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.435.000,- atau sebesar 45%

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 201.231.200,- terealisasi sebesar Rp. 171.107.500,- atau sebesar 85%

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan pagu anggaran sebesar Rp. 74.435.500,- terealisasi sebesar Rp. 51.960.000,- atau sebesar 70%

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 849.184.600,- terealisasi sebesar Rp. 510.807.600,- atau sebesar 60%

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 49.380.500,- terealisasi sebesar Rp. 26.405.000,- atau sebesar 53%

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.120.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.640.000,- atau sebesar 77%

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.056.562.000,- terealisasi sebesar Rp. 740.342.614,- atau sebesar 70%

6). Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 575.721.000,- terealisasi sebesar Rp. 553.400.000,- atau sebesar 96%

7). Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran sebesar Rp 25.537.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.053.800,- atau sebesar 28%

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 590.572.800,- terealisasi sebesar Rp. 475.370.866,- atau sebesar 80%

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 902.862.000,- terealisasi sebesar Rp. 765.701.864,- atau sebesar 85%

8). Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dengan pagu anggaran sebesar Rp. 731.840.000,- terealisasi sebesar Rp. 574.806.600,- atau sebesar 79%

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas dengan pagu anggaran sebesar Rp.

430.320.000,- terealisasi sebesar Rp. 295.581.600,- atau sebesar 69%

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 123.350.000,- terealisasi sebsar Rp. 79.665.000,- atau sebesar 65%

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 128.030.000,- terealisasi sebesar Rp. 102.751.500,- atau sebesar 80%

e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.420.000,- terealisasi sebesar Rp. 16.727.000,- atau sebesar 66%

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu :

1). Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu :

a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26.820.800,- terealisasi sebesar Rp. 15.217.500,- atau sebesar 57%

b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.215.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.990.500,- atau sebesar 55%

c. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 760.319.900,- terealisasi sebesar Rp. 522.310.000,- atau sebesar 69%

d. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Perubahan APBD dengan pagu anggaran sebsar Rp. 31.301.300,- terealisasi sebesar Rp. 4.211.100,- atau sebesar 13%

e. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 382.724.900,- terealisasi sebesar Rp. 75.195.764,- atau sebesar 20%

2). Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 23.432.000,- terealisasi sebesar Rp. 22.263.864,- atau sebesar 95%

b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 148.892.000,- terealisasi sebesar Rp. 84.939.300,- atau sebesar 57%

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 75.980.000,- terealisasi sebesar Rp. 26.949.992,- atau sebesar 35%

d. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.032.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.400.000, atau sebesar 31%

e. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait dengan pagu anggaran sebesar Rp. 170.547.232,- terealisasi sebesar Rp. 140.632.354,- atau sebesar 82%

f. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 148.774.000,- terealisasi sebesar Rp. 106.355.500,- atau sebesar 71%

3). Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan yaitu :

a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 49.125.000,- terealisasi sebesar Rp. 42.045.000,- atau sebesar 86%

b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban dengan pagu anggaran sebesar Rp. 72.917.232,- terealisasi sebesar Rp. 51.744.632,- atau sebesar 71%

c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 202.129.000,- terealisasi sebesar Rp. 164.036.025,- atau sebesar 81%

d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 89.497.000,- terealisasi sebesar Rp. 80.297.631,- atau sebesar 90%

e. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.614.500,- terealisasi sebesar Rp. 13.615.800,- atau sebesar 87%

f. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian dengan pagu anggaran sebesar Rp. 67.950.000,- terealisasi sebesar Rp. 49.650.000,- atau sebesar 73%

g. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 65.782.000,- terealisasi sebesar Rp. 46.206.900,-atau sebesar 70%

h. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 44.345.000,- terealisasi sebesar 0%

4). Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

a. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.999.995.172,- atau sebesar 100%;

b. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 175.956.449.500,- terealisasi sebesar Rp. 175.956.449.499,- atau sebesar 100%;

c. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.809.618.971,- terealisasi sebesar Rp. 1.089.774.712,- atau sebesar 39%;

d. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.357.934.761,- atau sebesar 32%.

5). Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 64.632.000,- terealisasi sebesar Rp. 49.544.086,- atau sebesar 77%.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah :

1). Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 10 (sepuluh) sub kegiatan yaitu :

a. Penyusunan Standar Harga dengan pagu anggaran sebsar Rp. 36.524.300,- terealisasi sebesar Rp. 26.675.444,- atau sebesar 73%;

b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.487.700,- terealisasi sebesar 0%;

c. Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 112.976.000,- terealisasi sebesar Rp. 89.270.000,- atau sebesar 79%;

d. Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 73.174.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.197.500,- atau sebesar 18%;

e. Pengamanan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 811.240.000,- terealisasi sebesar Rp. 390.216.931,21,- atau sebesar 48%;

f. Penilaian Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 41.202.000,- terealisasi sebesar Rp. 17.625.500,- atau sebesar 43%;

g. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 352.479.424,- terealisasi sebesar Rp. 326.021.644,- atau sebesar 92%

h. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 71.002.000,- terealisasi sebesar Rp. 49.070.300,- atau sebesar 69%;

i. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 53.080.000,- terealisasi sebesar Rp. 22.400.000,- atau sebesar 42%;

j. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 68.813.000,- terealisasi sebesar 0%.

***Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2022 (n-1)***

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Kinerja *Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran* yang terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan yaitu :

   1). Kegiatan Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 12.183.000,- teralisasi sebesar Rp. 1.615.000,- atau sebesar 13,26%

   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan pagu sebesar Rp. 7.165.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.087.500,- atau sebesar 71%

   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan pagu sebesar Rp.11.220.000,- dengan realisasi Rp. 6.970.000,- atau sebesar 62,12%

   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.999.500,- terlisasi sebesar Rp 1.674.000,- atau sebesar 33,48%

   e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan pagu sebesar Rp. 4.994.500,- terealisasi sebesr Rp. 3.350.000,- atau sebesar 67,07 %

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.999.000,- terealisasi sebesar 0%

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.999.500,-terealisasi sebesar Rp. 3.235.000,- atau sebesar 32,35%.

2). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.397.753.511,- terealisasi sebesar Rp. 4.733.880.781,- atau sebesar 73,99%

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.553.472.500,- terealisasi sebesar Rp. 1.365.097.000,- atau sebesar 87,87%.

3). Kegiatan Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.992.000,- terealisasi sebesar 0%

b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.957.700,- terealisasi sebesarRp. 2.200.000 atau sebesar 22,09%

c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- terealisasi sebesar 0%

4). Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan pagu anggaran sebesar Rp. 40.294.000,- terealisasi sebesar Rp. 16.204.400,- atau sebesar 40,22%

b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 320.340.000,- terealisasi sebesar Rp. 47.646.312,- atau sebesar 14,87%.

c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 375.662.000,- terealisasi sebesar Rp. 135.206.188,- atau sebesar 35,99%.

5). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 76.705.000,- terealisasi sebesar Rp. 22.270.000,- atau sebesar 29,03%

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 820.793.200,- terealisasi sebesar Rp. 659.013.900,- atau sebesar 80,29%

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan pagu anggaran sebesar Rp. 514.127.500,- terealisasi sebesar Rp. 481.543.200,- atau sebesar 93,66%

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.083.415.640,- terealisasi sebesar Rp. 777.429.830,- atau sebesar 71,76%

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 33.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 32.512.000,- atau sebesar 97,65%

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.012.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.020.000,- atau sebesar 83,42%

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.188.882.000terealisasi sebesar Rp. 988.380.990,- atau sebesar 83,14%

6). Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.033.150.000,- terealisasi sebesar Rp1.032.700.000,- atau sebesar 99,96%

b. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Operasional dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.366.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.276.500.000,- atau sebesar 93,39%

7). Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran sebesar Rp 24.995.000,- terealisasi sebesar Rp. 21.933.500,- atau sebesar 87,75%

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.061.769.416,- terealisasi sebesar Rp. 839.026.878,- atau sebesar 79,02%

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.138.008.768,- terealisasi sebesar Rp. 908.510.900,- atau sebesar 79,83%

8). Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dengan pagu anggaran sebesar Rp. 303.130.000,- terealisasi sebesar Rp. 252.161.157,- atau sebesar 83,19%

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas dengan pagu anggaran sebesar Rp. 934.190.000,- terealisasi sebesar Rp. 796.661.400,- atau sebesar 85,28%

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 145.110.000,- terealisasi sebsar Rp. 87.882.296,- atau sebesar 60,56%

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 990.719.259,- terealisasi sebesar Rp. 545.563.259,- atau sebesar 55,07%

e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 412.725.000,- terealisasi sebesar Rp. 311.486.000,- atau sebesar 75,47%

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu :

1). Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu :

a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS dengan pagu anggaran sebesar Rp 24.963.500,- terealisasi sebesar Rp. 19.821.000,- atau sebesar 79,40%

b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan pagu anggaran sebesar Rp. 47.060.000,- terealisasi sebesar Rp. 31.630.000,- atau sebesar 67,21%

c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.026.270.000,- terealisasi sebesar Rp. 146.387.040,- atau sebesar 14,26%.

d. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 966.302.500,- terealisasi sebesar Rp. 190.906.382,- atau sebesar 19,76%

e. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan pagu anggaran sebsar Rp. 177.322.000,- terealisasi sebesar Rp. 137.060.478,- atau sebesar 77,29%

f. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 224.716.000,- terealisasi sebesar Rp. 92.324.158,- atau sebesar 41,08%

2). Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.720.000,- terealisasi sebesar Rp. 44.046.292,- atau sebesar 96,34%

b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 32.803.000,- terealisasi sebesar Rp. 30.938.000,- atau sebesar 94,31%

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 59.952.608,- atau sebesar 99,92%

d. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas dengan pagu anggaran sebesar Rp. 21.402.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.550.701, atau sebesar 96,02%

e. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait dengan pagu anggaran sebesar Rp. 69.750.000,- terealisasi sebesar Rp. 69.689.000,- atau sebesar 99,91%

f. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 70.322.000,- terealisasi sebesar Rp. 70.248.100,- atau sebesar 99,89%

3). Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan yaitu :

a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 37.684.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.696.000,- atau sebesar 86%

b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban dengan pagu anggaran sebesar Rp. 81.128.000,- terealisasi sebesar Rp. 64.773.386,- atau sebesar 79,84%

c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 230.379.000,- terealisasi sebesar Rp. 220.264.535,- atau sebesar 95,61%

d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 125.532.000,- terealisasi sebesar Rp. 89.844.000,- atau sebesar 71,57%

e. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26.184.800,- terealisasi sebesar Rp. 15.701.900,- atau sebesar 57,97%

f. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian dengan pagu anggaran sebesar Rp. 42.630.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.493.400,- atau sebesar 34%

g. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 44.774.000,- terealisasi sebesar Rp. 30.969.400,-atau sebesar 69,17%

h. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 88.615.000,- terealisasi sebesar 0%

4). Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

a. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.999.996.003,- atau sebesar 100%;

b. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 162.106.005.000,- terealisasi sebesar Rp. 162.017.152.400,- atau sebesar 99,95%;

c. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.830.269.792,- terealisasi sebesar Rp. 1.289.277.582,- atau sebesar 9,32%;

d. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.461.404.233,- terealisasi sebesar Rp. 1.479.323.792,- atau sebesar 22,89%.

5). Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 232.581.000,- terealisasi sebesar Rp. 217.802.681,- atau sebesar 93,65%.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah :

1). Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan yaitu :

a. Penyusunan Standar Harga dengan pagu anggaran sebsar Rp. 19.864.000,- terealisasi sebesar Rp. 17.358514,- atau sebesar 87,39%;

b. Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 90.616.000,- terealisasi sebesar Rp. 60.315.007,- atau sebesar 66,56%;

c. Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 73.174.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.197.500,- atau sebesar 18%;

d. Pengamanan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.245.848.823,- terealisasi sebesar Rp. 312.782.472,- atau sebesar 2,84%;

e. Penilaian Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 32.510.000,- terealisasi sebesar Rp. 26.440.639,- atau sebesar 81,33%;

f. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 47.524.000,- terealisasi sebesar Rp. 45.644.818,- atau sebesar 96,05%;

g. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.835.400,- atau sebesar 90,39%;

h. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 132.392.000,- terealisasi sebesar 130.555.161,- atau sebesar 98,61 0%.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan kegiatan pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan pada saat ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan dan Peraturan Bupati Kabupaten Seruyan Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Keuangan dan Aset Daerah.

Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan terdiri dari:

a. Kepala Badan;
b. Sekretaris, terdiri atas :
   1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
   2) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
c. Bidang Anggaran Daerah, terdiri atas :
   1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah; dan
   2) Sub Bidang Verifikasi dan Kebijakan Anggaran.
d. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri atas :
   1) Sub Bidang Perbendaharaan; dan
   2) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
e. Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah, terdiri atas :
   1) Sub Bidang Akuntansi dan Evaluasi; dan
   2) Sub Bidang Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
f. Bidang Aset Daerah, terdiri atas :
   1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah; dan
   2) Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan diuraikan sebagai berikut:

1. **KEPALA BADAN**

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan, mengoordinasikan, menetapkan serta menyelenggarakan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan dibidang

keuangan dan Aset Daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan dan penetapan rencana kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi badan;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi Badan;
c. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi Badan;
d. Penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. **SEKRETARIS**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian. Dan barang milik daerah pada Dinas serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja sekretariat;
b. Pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Badan;
c. Pengoordinasian administrasi keuangan Badan;
d. Pengoordinasian administrasi barang milik daerah Badan;

e. Pengoordinasian administrasi kepegawaian Badan;
f. Pengoordinasian administrasi umum Badan;
g. Pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan badan;
h. Pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Badan;
i. Pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Badan;
j. Pengoordinasian administrasi pendapatan daerah kewenangan Badan;
k. Penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Sekretariat sebagaimana dimaksud terdiri atas :

1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum Perlengkapan dan Kepegawaian.

**a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan**

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan. Subbagian penyusunan program dan keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
b. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Dokumen Perencanaan Badan;
c. Melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Badan;

d. Melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan;
e. Melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan;
f. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja Badan;
g. Melaksanakan administrasi keuangan Badan;
h. Melaksanakan administrasi pendapatan daerah kewenangan Badan;
i. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan Prestasi kerja bawahan; dan
j. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

**b. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian**

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
b. Melaksanakan Administrasi Umum Badan;
c. Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Badan;
d. Melaksanakan pemeliharaan Barang Milik Daerah Badan;
e. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Badan;
f. Menilai dan mengevaluasi sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
g. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

### 3. BIDANG ANGGARAN DAERAH

Bidang Anggaran Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Anggaran Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan perencanaan anggaran, kebijakan umum pengelolaan anggaran dan pembinaan pelaksanaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Bidang Anggaran Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Anggaran Daerah;
b. Pengoordinasian rumusan kebijakan teknis pelaksanaan Anggaran Daerah;
c. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan anggaran Daerah;
d. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan perumusan kebijakan pengelolaan anggaran daerah;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan pelaksanaan anggaran daerah;
f. Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan teknis penyusunan anggaran pada seluruh perangkat daerah;
g. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan Bidang;
h. Pembinaan penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten;
i. Penilaian dan pengavaluasian sasaran kinerja Pegawai dan Prestasi kerja bawahan ; dan
j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bidang Anggaran terdiri atas :

a. Subbidang Perencanaan dan Anggaran Daerah; dan
b. Subbidang Verifikasi dan Kebijakan Anggaran

**a. Sub Bidang Perencanaan dan Anggaran Daerah**

Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Anggaran Daerah.

Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengoordinasian dan penyusunan KUA dan PPAS;
c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengoordinasian dan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengoordinasian dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengoordinasian dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengoordinasian Perencanaan Anggaran Pendapatan;
g. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengoordinasian perencanaan Anggaran Belanja Daerah;
h. Melaksanakan rumusan kebijakan teknis pembinaan pengganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten;

i. Menilai dan mengevaluasi sasaran Kinerja Pegawai dan Prestasi Kerja Bawahan; dan
j. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

**b. Sub Bidang Verifikasi dan Kebijakan Anggaran**

Subbidang Verifikasi dan Kebijakan Anggaran dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Anggaran Daerah.

Subbidang Verifikasi dan Kebijakan Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbidang Verifikasi dan Kebijakan Anggaran;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengoordinasian, penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengoordinasian, penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;
d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengoordinasian, penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengoordinasian, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengoordinasian dan penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;
g. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengoordinasian perencanaan Anggaran Pembiayaan;
h. Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan Prestasi kerja bawahan; dan
i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

## 4. BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH

Bidang Perbendaharaan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Perbendaharaan Daerah, mempunyai tugas pengelolaan perbendaharaan, investasi dan penunjang urusan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang perbendaharaan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan dan Perencanaan kegiatan program kerja pada bidang perbendaharaan Daerah;
b. Pengoordinasian rumusan kebijakan teknis pelaksanaan perbendaharaan Daerah
c. Pengoordinasian pengelolaan Kas Daerah;
d. Pengoordinasian Pengelollan sisa Lebih perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
e. Pengoordinasian penyiapan, Pelaksanaan pengendalian dan penerbitan Anggaran Kas dan SPD;
f. Pengoordinasian penatausahaan pembiayaan Daerah;
g. Pengoordinasian Pelaksanaan Kerjasama dan pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank;
h. Pengoordinasian, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
i. Pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas;
j. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
k. Pengoordinasian pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang daerah sebagai Optimalisasi Kas;

l. Pengoordinasian Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait;
m. Penyusunan petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan;
n. Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten;
o. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan Prestasi kerja bawahan; dan
p. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bidang Perbendaharaan Daerah terdiri atas :

a. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
b. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.

**a. Sub Bidang Perbendaharaan**

Subbidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Perbendsharaan Daerah.

Subbidang Perbendaharaan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbidang Perbendaharaan;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Penatausahaan Pembiayaan Daerah;
c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengoordinasian, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;

d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengoordinasian dan penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
e. menyiapkan bahan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait;
f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan;
g. melaksanakan rumusan kebijakan teknis pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten;
h. melaksanakan rumusan kebijakan teknis penyusunan kebijakan dan Alokasi Subsidi;
i. melaksanakan rumusan kebijakan teknis analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
j. melaksanakan rumusan kebijakan teknis pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
k. melaksanakan rumusan kebijakan teknis Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten;
l. menilai dan mengevaluasi sasaran Kinerja Pegawai dan Prestasi Kerja bawahan; dan
m. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan;

**b. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah**

Subbidang Pengelolaan Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendahaaran Daerah.

Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengoordinasian dan pengelolaan Kas Daerah;
c. melaksanakan rumusan kebijakan teknis pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya;
d. melaksanakan rumusan kebijakan teknis penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;
e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengoordinasian, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengoordinasian Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas;
g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah;
h. melaksanakan rumusan kebijakan teknis Analisis Investasi Pemerintah Daerah;
i. melaksankan rumusan kebijakan teknis Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah;

j. melaksanakan rumusan kebijakan teknis Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah;
k. melaksanakan rumusan kebijakan teknis Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah;
l. melaksanakan rumusan kebijakan teknis Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah;
m. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan Prestasi kerja bawahan; dan
n. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

**5. BIDANG AKUNTANSI, PELAPORAN DAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH**

Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan akuntansi, pelaporan keuangan daerah, pengelolaan data implementasi system informasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
b. Pengoordinasian rumusan kebijakan teknis pelaksanaan akuntansi, pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
c. Pengoordinasian pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;

d. Pengoordinasian rekonsiliasi dan verifikasi asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO beban;
e. Pengoordinasian penyusunan stastistik keuangan pemerintah Daerah;
f. Pengoordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran;
g. Pengoordinasian pelaksanaan konsilidasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
h. Pengoordinasian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten
i. Pengoordinasian penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
j. Pengoordinasian, sinkronisasi dan pelaksanaan penyelesaian tuntutan Perbendaharaan dan Tututan Kerugian Daerah;
k. Pengoordinasian penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
l. Pengoordinasian penyusunan kebijakan dan Panduan Teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah;
m. Pengoordinasian penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
n. Pengoordinasian Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah;
o. Pengoordinasian Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah;
p. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
q. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten;

r. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten;
s. Penilian dan pengevalusian sasaran Kinerja Pegawai dan Prestasi kerja bawahan; dan
t. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah terdiri atas :

a. Subbidang Akuntansi dan Evaluasi; dan
b. Subbidang Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

**a. Sub Bidang Akuntansi dan Evaluasi**

Subbidang Akuntansi dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Subbidang Akuntansi dan Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbidang akuntansi dan evaluasi;
b. Melaksanakan rumusan kebijakan teknis pengoordinasian Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban;
d. menyiapkan bahan penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;
e. menyiapkan beban penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;

f. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten;
g. Melaksanakan rumusan kebijakan teknis pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten;
h. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pengoordinasian dan penyusunan Stastitik Keuangan Pemerintah Daerah;
i. Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi Kerja Bawahan; dan
j. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

**b. Sub Bidang Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah**

Subbidang Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Subbidang Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbidang Pelaporan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
b. Melaksanakan rumusan kebijakan teknis pengoordinasian Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
c. Melaksanakan rumusan kebijakan teknis Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
d. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pengoordinasian dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten;

e. Menyiapkan bahan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
f. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pengoordinasian, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;
g. menyiapkan bahan penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
h. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

**6. BIDANG ASET DAERAH**

Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Aset Daerah mempunyai tugas Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pokok-pokok pengelolaan Barang Milik Daerah, penyusunan standar harga satuan barang, penyusunan dan pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah, penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Aset mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Bidang Aset Daerah;
b. Pengoordinasian rumusan kebijakan teknis pelaksanaan Aset Daerah;

c. Pengoordinasian, pengarahan dan membina penyelenggaraan inventarisasi/ pengolahan data barang-barang milik daerah sebagai bahan informasi untuk menyusun neraca barang milik daerah;
d. Pengoordinasian penyusunan standar harga satuan;
e. Pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pengadaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
f. Pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
g. Pengoordinasian pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD);
h. Pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
i. Pengoordinasian pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hokum Barang Milik Daerah (BMD);
j. Pengoordinasian penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD);
k. Pengoordinasian hasil penilaian Barang Milik Daerah (BMD);
l. Pelaksanaan penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD);
m. Pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD);
n. Pengoordinasian penyusunan dan penghimpunan laporan Barang Milik Daerah (BMD) dari perangkat daerah;
o. Perumusan petunjuk teknis sistem dan prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
p. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah;

q. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten;
r. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan Prestasi kerja bawahan; dan
s. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bidang Aset Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu:

a. Subbidang Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah; dan
b. Subbidang Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

**a. Sub Bidang Perencanaan, dan Pengamanan Barang Milik Daerah**

Subbidang Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang asset Daerah.

Subbidang Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah;
b. Menyiapkan bahan Penyusunan Standar Harga;
c. Menyiapkan bahan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
d. Menyiapkan bahan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
e. Menyiapkan bahan penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
f. Melaksanakan rumusan kebijakan teknis pengamanan Barang Milik Daerah;

g. Melaksanakan rumusan kebijakan teknis pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah;
h. Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan Prestasi Kerja bawahan; dan
i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

**b. Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah**

Subbidang Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dipimpin oleh kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset Daerah.

Subbidang Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

a. merumuskan dan meencanakan kegiatan program kerja pada sub bidang Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
b. melaksanakan rumusan kebijakan teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah;
c. melaksanakan rumusan kebijakan teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah;
d. melaksanakan rumusan kebijakan teknis Penilaian Barang Milik Daerah;
e. melaksanakan rumusan kebijakan teknis Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
f. melaksanakan rumusan kebijakan teknis rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
g. menyiapkan bahan penyusunan laporan Barang Milik Daerah;
h. melaksanakan rumusan kebijakan teknis Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten;

i. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan Prestasi kerja bawahan; dan

j. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

**7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan dapat menetapkan jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pada masing masing. Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas.

Penetapan Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai uraian tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan Bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Perangkat Daerah.

(4) Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional masing-masing.

Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan sebagaimana tabel berikut ini:

**TABEL 1**

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

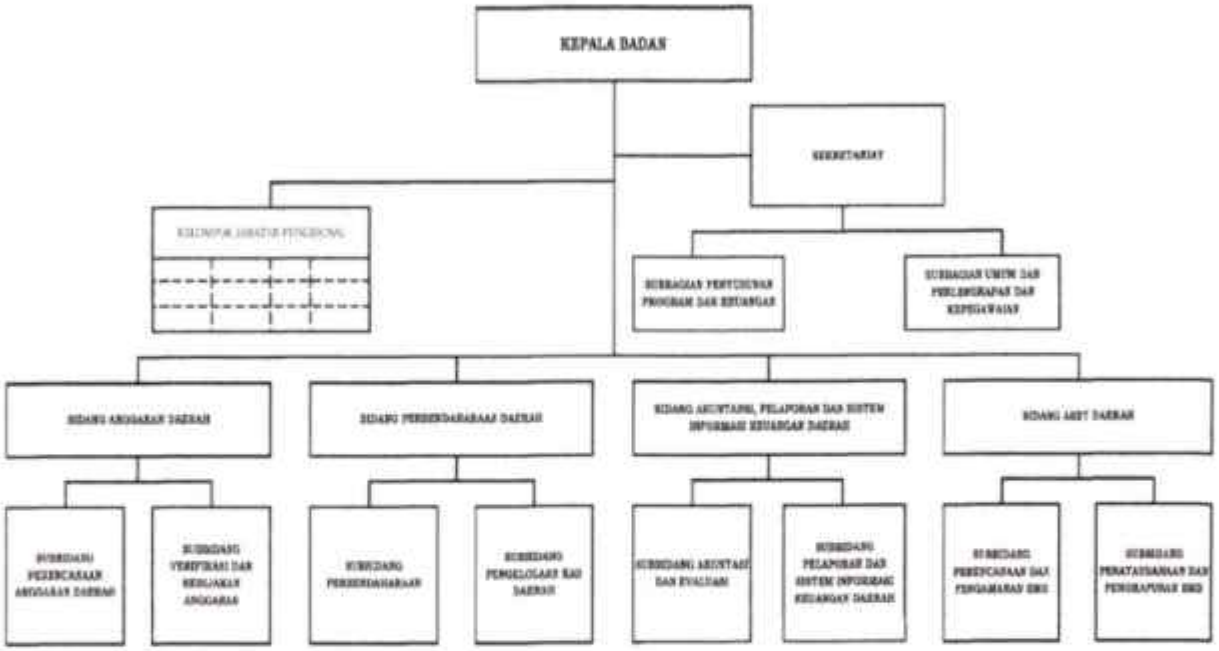

Analisis kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan yang disajikan pada tabel berikut adalah capaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan selama kurun waktu 1 *(satu)* Tahun terakhir yang merupakan periode capaian untuk tahun kedua (Tahun 2023) yang berdasarkan Perubahan Renstra Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2**
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

| No | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target | | | | | | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| I | Opini BPK Terhadap laporan Keuangan | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | | | | | | | | | | | | |
| II | Indeks Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | Persen | - | - | | 84,95 | 85,65 | 86,50 | | - | - | 83,29 | 84,51 |

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintah Pusat yang bersih dan akuntabel serta Pemerintah Daerah yang tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan daya saing yang sehat antar daerah sehingga terwujud kesatuan bangsa baik di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, telah diatur perimbangan keuangaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

berupa sistem keuangan berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan.

Dan sesuai pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah. Kekuasan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini BKAD Kabupaten Seruyan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi terdapat isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan antara lain :

1. Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan terhadap perangkat daerah belum sepenuhnya menggunakan teknologi informasi;
2. Belum optimalnya perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal belum maksimal;
4. Perlu adanya peningkatan integeritas, kompetensi, displin dan kinerja aparatur pengelola keuangan dan aset daerah;
5. Penatausahaan barang milik daerah perlu ditingkatkan;
6. Belum optimalnya penyusunan perencanaan kebutuhan barang BMD dan rencana kebutuhan pemeliharaan BMD;
7. Terbatasnya kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Strategi yang digunakan dalam rangka tindak lanjut permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah terhadap perangkat daerah yang mudah, cepat, transparan dan berbasis teknologi informasi;
2. Meningkatkan kualitas SDM Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Penguatan terhadap pemahaman sistem pengendalian internal pemerintah;
4. Meningkatkan integeritas, kompetensi, disiplin dan kinerja aparatur BKAD;
5. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan rekonsiliasi terhadap pengelolaan barang milik daerah;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang menyusun perencanaan kebutuhan barang milik daerah;
7. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur baik secara kuantitatif maupun kualitatif guna menunjang pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Langkah-langkah yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;
2. Penyediaan anggaran untuk kegiatan pelatihan/bimbingan teknis perencanaan;
3. Melaksanakan pengendalian secara terintegerasi dalam pelaksanaan tindakan manajerial dan kegiatan teknis;
4. Penyediaan anggaran yang memadai untuk kegiatan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada seluruh pegawai BKAD;
5. Penyediaan anggaran yang memadai untuk kegiatan rekonsiliasi pengelolaan barang milik daerah;
6. Penyediaan anggaran untuk kegiatan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah;

7. Penyediaan anggaran yang memadai untuk kegiatan pelatihan/bimbingan teknis untuk seluruh pegawai BKAD.

## 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 terhadap analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 sebagai berikut :

TABEL 3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN SERUYAN

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 270.935.590.752,00 | | | | | 270.935.590.752,00 | |
| | KEUANGAN | | | | 270.935.590.752,00 | | | | | 270.935.590.752,00 | |
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran | 98 % | 23.996.175.010,00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran | 98 % | 23.996.175.010,00 | |
| 1. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%) | 98 % | 300.000.000,00 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%) | 98 % | 300.000.000,00 | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15 Dokumen | 50.000.000,00 | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15 Dokumen | 50.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 6 Dokumen | 30.000.000,00 | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 6 Dokumen | 30.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6 Dokumen | 30.000.000,00 | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6 Dokumen | 30.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 6 Dokumen | 50.000.000,00 | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 6 Dokumen | 50.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 6 Dokumen | 50.000.000,00 | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 6 Dokumen | 50.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan | 30.000.000,00 | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan | 30.000.000,00 | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25 Laporan | 60.000.000,00 | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25 Laporan | 60.000.000,00 | |
| 2. | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Persentase unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan** | 98 % | 8.291.033.748,00 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Persentase unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan** | 98 % | 8.291.033.748,00 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 52 Orang/bulan | 6.617.561.248,00 | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 52 Orang/bulan | 6.617.561.248,00 | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 Dokumen | 1.553.472.500,00 | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 Dokumen | 1.553.472.500,00 | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 25.000.000,00 | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 25.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 Laporan | 25.000.000,00 | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 Laporan | 25.000.000,00 | |
| | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 5 Dokumen | 25.000.000,00 | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 5 Dokumen | 25.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 Laporan | 25.000.000,00 | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 Laporan | 25.000.000,00 | |
| | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 5 Dokumen | 20.000.000,00 | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 5 Dokumen | 20.000.000,00 | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 3. | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | **Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD** | 98 % | 300.000.000,00 | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | **Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD** | 98 % | 300.000.000,00 | |
| | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 5 Dokumen | 30.000.000,00 | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 5 Dokumen | 30.000.000,00 | |
| | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 5 Dokumen | 50.000.000,00 | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 5 Dokumen | 50.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 12 Laporan | 35.000.000,00 | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 12 Laporan | 35.000.000,00 | |
| | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 50.000.000,00 | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 50.000.000,00 | |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 35.000.000,00 | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 35.000.000,00 | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 50.000.000,00 | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 50.000.000,00 | |
| | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 5 Dokumen | 50.000.000,00 | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 5 Dokumen | 50.000.000,00 | |
| 4. | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **Persentase Pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah** | **98 %** | **1.165.000.000,00** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **Persentase Pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah** | **98 %** | **1.165.000.000,00** | |
| | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | 30.000.000,00 | | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | 30.000.000,00 | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 110 Paket | 290.000.000,00 | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 110 Paket | 290.000.000,00 | |
| | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 25.000.000,00 | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 25.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 20.000.000,00 | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 20.000.000,00 | |
| | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 Dokumen | 25.000.000,00 | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 Dokumen | 25.000.000,00 | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | 75.000.000,00 | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | 75.000.000,00 | |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 80 Orang | 300.000.000,00 | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 80 Orang | 300.000.000,00 | |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan | 25 Orang | 400.000.000,00 | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 25 Orang | 400.000.000,00 | |
| 5. | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum perangkat Daerah** | 98 % | 3.663.882.000,00 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum perangkat Daerah** | 98 % | 3.663.882.000,00 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 50.000.000,00 | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 50.000.000,00 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 Paket | 800.000.000,00 | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 Paket | 800.000.000,00 | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 8 Paket | 225.000.000,00 | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 8 Paket | 225.000.000,00 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 8 Paket | 1.200.000.000,00 | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 8 Paket | 1.200.000.000,00 | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 30.000.000,00 | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 30.000.000,00 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 30.000.000,00 | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 30.000.000,00 | |
| | Penyediaan Bahan/Material | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penyediaan Bahan/Material | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 2 Paket | 20.000.000,00 | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 2 Paket | 20.000.000,00 | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4 Laporan | 50.000.000,00 | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4 Laporan | 50.000.000,00 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200 Laporan | 1.188.882.000,00 | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200 Laporan | 1.188.882.000,00 | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen | 20.000.000,00 | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen | 20.000.000,00 | |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 8 Dokumen | 50.000.000,00 | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 8 Dokumen | 50.000.000,00 | |
| 5. | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Persentase pengadaan BMD terhadap pengadaan RKBMD** | 98 % | 5.646.053.000,00 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Persentase pengadaan BMD terhadap pengadaan RKBMD** | 98 % | 5.646.053.000,00 | |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | R4 = 3, R2 = 5 Unit | 1.926.573.000,00 | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | R4 = 3, R2 = 5 Unit | 1.926.573.000,00 | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4 Unit | 1.979.480.000,00 | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4 Unit | 1.979.480.000,00 | |
| | Pengadaan Mebel | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pengadaan Mebel | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 20 Unit | 200.000.000,00 | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 20 Unit | 200.000.000,00 | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 200.000.000,00 | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 200.000.000,00 | |
| | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 20.000.000,00 | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 20.000.000,00 | |
| | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 2 Unit | 20000000 | | | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 2 Unit | 20000000 | |
| | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 900.000.000,00 | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 900.000.000,00 | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 200.000.000,00 | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 200.000.000,00 | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 200.000.000,00 | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 200.000.000,00 | |
| 7. | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah** | 98 % | 2.370.191.272,00 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah** | 98 % | 2.370.191.272,00 | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 50.000.000,00 | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 50.000.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 1.132.182.504,00 | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 1.132.182.504,00 | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 50.000.000,00 | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 50.000.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.138.008.768,00 | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.138.008.768,00 | |
| 8. | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Persentase terpeliharanya BMD SKPD** | 98 % | 2.259.955.000,00 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Persentase terpeliharanya BMD SKPD** | 98 % | 2.259.955.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | R4 = 4, R2 =30 Unit | 306.260.000,00 | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | R4 = 4, R2 =30 Unit | 306.260.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 18 Unit | 873.695.000,00 | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 18 Unit | 873.695.000,00 | |
| | Pemeliharaan Mebel | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pemeliharaan Mebel | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 20 Unit | 50.000.000,00 | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 20 Unit | 50.000.000,00 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 132 Unit | 180.000.000,00 | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 132 Unit | 180.000.000,00 | |
| | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 60 Unit | 60.000.000,00 | | | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 60 Unit | 60.000.000,00 | |
| | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 Unit | 40.000.000,00 | | | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 Unit | 40.000.000,00 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 150.000.000,00 | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 150.000.000,00 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 300.000.000,00 | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 300.000.000,00 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 300.000.000,00 | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 300.000.000,00 | |
| II. | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | **Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** | 98 % | 346.279.475.732,00 | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | **Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** | 98 % | 346.279.475.732,00 | |
| | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | | **Ketetapan waktu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeah (APBD)** | 98 % | 1.800.000.000,00 | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | | **Ketetapan waktu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeah (APBD)** | 98 % | 1.800.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 35.000.000,00 | | | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 35.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 35.000.000,00 | | | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 35.000.000,00 | |
| | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 41 Dokumen | 1.025.000.000,00 | | | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 41 Dokumen | 1.025.000.000,00 | |
| | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | 41 Dokumen | 25.000.000,00 | | | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | 41 Dokumen | 25.000.000,00 | |
| | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi | 41 Dokumen | 50.000.000,00 | | | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi | 41 Dokumen | 50.000.000,00 | |
| | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | 41 Dokumen | 50.000.000,00 | | | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | 41 Dokumen | 50.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2 Dokumen | 100.000.000,00 | | | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2 Dokumen | 100.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 Dokumen | 100000000 | | | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 Dokumen | 100000000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 2 Dokumen | 70.000.000,00 | | | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 2 Dokumen | 70.000.000,00 | |
| | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | |
| | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | |
| | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | |
| | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 80 Orang | 160.000.000,00 | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 80 Orang | 160.000.000,00 | |
| | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | | **Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/Kota/Desa** | **98 %** | **600.000.000,00** | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | | **Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/Kota/Desa** | **98 %** | **600.000.000,00** | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 40 Dokumen | 67.922.000,00 | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 40 Dokumen | 67.922.000,00 | |
| | Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 40 Laporan | 38.414.000,00 | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 40 Laporan | 38.414.000,00 | |
| | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 40 Dokumen | 52.462.000,00 | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 40 Dokumen | 52.462.000,00 | |
| | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | 10 Dokumen | 47.608.000,00 | | | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | 10 Dokumen | 47.608.000,00 | |
| | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 10 Dokumen | 48.415.000,00 | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 10 Dokumen | 48.415.000,00 | |
| | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 10 Dokumen | 58.222.000,00 | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 10 Dokumen | 58.222.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 48 Laporan | 76.019.000,00 | | | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan | 48 Laporan | 76.019.000,00 | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | 10 Dokumen | 25.634.000,00 | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | 10 Dokumen | 25.634.000,00 | |
| | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 40 Dokumen | 68.539.000,00 | | | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 40 Dokumen | 68.539.000,00 | |
| | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 10 Dokumen | 53.351.000,00 | | | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 10 Dokumen | 53.351.000,00 | |
| | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 120 Orang | 54.014.000,00 | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 120 Orang | 54.014.000,00 | |
| | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | | **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel sesuai SAP atas pelaksanaan APBD dan Perda / Perbub Pertanggungjawaban APBD** | **98 %** | **700.000.000,00** | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | | **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel sesuai SAP atas pelaksanaan APBD dan Perda / Perbub Pertanggungjawaban APBD** | **98 %** | **700.000.000,00** | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 41 Laporan | 39.670.369,00 | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 41 Laporan | 39.670.369,00 | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | 41 Dokumen | 51.000.000,00 | | | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | 41 Dokumen | 51.000.000,00 | |
| | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 3 Laporan | 33.680.000,00 | | | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 3 Laporan | 33.680.000,00 | |
| | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 41 Laporan | 253.993.391,00 | | | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 41 Laporan | 253.993.391,00 | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 3 Dokumen | 107.183.500,00 | | | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 3 Dokumen | 107.183.500,00 | |
| | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 28 Dokumen | 48.474.800,00 | | | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 28 Dokumen | 48.474.800,00 | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 1 Dokumen | 27.098.000,00 | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 1 Dokumen | 27.098.000,00 | |
| | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 Dokumen | 9.900.000,00 | | | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 Dokumen | 9.900.000,00 | |
| | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | | | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | |
| | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 54.000.000,00 | | | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 54.000.000,00 | |
| | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 1 Orang | 66.000.000,00 | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 1 Orang | 66.000.000,00 | |
| | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina | 13 Lembaga | 7.000.000,00 | | | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina | 13 Lembaga | 7.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 5.000.000,00 | | | Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 5.000.000,00 | |
| | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | | **Persentase Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa** | 98 % | 242.879.475.731,00 | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | | **Persentase Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa** | 98 % | 242.879.475.731,00 | |
| | Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | |
| | Analisis Investasi Pemerintah Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Analisis Investasi Pemerintah Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah | 1 Laporan | 12.962.500.000,00 | | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah | 1 Laporan | 12.962.500.000,00 | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi | 4 Laporan | 2.000.000.000,00 | | | Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi | 4 Laporan | 2.000.000.000,00 | |
| | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 4 Laporan | 183.789.449.373,00 | | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 4 Laporan | 183.789.449.373,00 | |
| | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 4 Laporan | 37.926.634.897,00 | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 4 Laporan | 37.926.634.897,00 | |
| | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | 2 Laporan | 6.180.894.463,00 | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | 2 Laporan | 6.180.894.463,00 | |
| | **Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah** | | **Cakupan Pelayanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah** | **98 %** | **300.000.000,00** | **Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah** | | **Cakupan Pelayanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah** | **98 %** | **300.000.000,00** | |
| | Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | | | Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | |
| | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 1 Dokumen | 90.000.000,00 | | | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 1 Dokumen | 90.000.000,00 | |
| | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 100 Orang | 200.000.000,00 | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 100 Orang | 200.000.000,00 | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | **Persentase pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **98 %** | **650.000.000,00** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | | **Persentase pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **98 %** | **650.000.000,00** | |
| | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | Persentase pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah | 98 % | 650.000.000,00 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | Persentase pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah | 98 % | 650.000.000,00 | |
| | Penyusunan Standar Harga | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penyusunan Standar Harga | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 2 Dokumen | 40.000.000,00 | | | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 2 Dokumen | 40.000.000,00 | |
| | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | | | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | |
| | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen | 20.000.000,00 | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen | 20.000.000,00 | |
| | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | | | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 2 Laporan | 54.000.000,00 | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 2 Laporan | 54.000.000,00 | |
| | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 1 Laporan | 50.000.000,00 | | | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 1 Laporan | 50.000.000,00 | |
| | Pengamanan Barang Milik Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pengamanan Barang Milik Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 2 Laporan | 120.000.000,00 | | | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 2 Laporan | 120.000.000,00 | |
| | Penilaian Barang Milik Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penilaian Barang Milik Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 5 Laporan | 40.000.000,00 | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 5 Laporan | 40.000.000,00 | |
| | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2 Laporan | 40.000.000,00 | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2 Laporan | 40.000.000,00 | |
| | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 70 Dokumen | 96.000.000,00 | | | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 70 Dokumen | 96.000.000,00 | |
| | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 86 Laporan | 90.000.000,00 | | | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 96 Laporan | 90.000.000,00 | |
| | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 2 Laporan | 30.000.000,00 | | | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 2 Laporan | 30.000.000,00 | |
| | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 80 Orang | 50.000.000,00 | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 80 Orang | 50.000.000,00 | |

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

M. ALAMSYAH, S.E., M.A.P.
NIP. 19790527 200604 2 024

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas sasaran dan pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai tugas dan fungsi SKPD. Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung BKAD, LSM, organisasi atau perguruan tinggi.

Mengingat Badan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan SKPD yang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik, maka telaahan terhadap usulan masyarakat lebih diutamakan dalam upaya penyusunan dokumen perencanaan yang lebih baik dan akuntabel. Adapun program kegiatan dan sub kegiatan yang terkait isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan dan dibutuhkan untuk meningkatkan tertib administrasi keuangan dan aset daerah. Program kegiatan dan sub kegiatan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   a. **Kegiatan Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
      1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**b. Kegiatan Administrasi Keuangan, terdiri dari :**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

**c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari :**

1. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4. Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
5. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
6. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7. Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

**d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari:**

1. Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi kepegawaian
5. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
6. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
7. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
8. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan

**e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari :**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
8. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
9. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

10. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
11. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

f. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari :**

1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan
3. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
4. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
6. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
7. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
5. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
6. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. **Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

1. **Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, terdiri dari :**

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
c. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
d. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
e. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

f. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
h. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
i. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
j. Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
k. Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
l. Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
m. Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

2. **Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, terdiri dari :**
   a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
   b. Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
   c. Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
   d. Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah
   e. Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

f. Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
h. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
i. Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
j. Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.
k. Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3. **Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari :**
   a. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
   b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban

c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
d. Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
f. Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
g. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
h. Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
i. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
j. Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
k. Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
l. Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
m. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah

4. **Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :**
   a. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah
   b. Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah
   c. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
   d. Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
   e. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
   f. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

5. **Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dari :**
   a. Sub Kegiatan Inventarisasi Dan Analisis Data Bidang Keuangan
   b. Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
   c. Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**
   1. **Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari :**
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga
      b. Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
      c. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
      d. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
      e. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah

f. Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah
g. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah
h. Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah
i. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
j. Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
k. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
l. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
m. Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

# BAB III

# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun Program Pembangunan Nasional. Program Pembangunan Nasional merupakan rencana induk pembangunan perencanaan nasional hasil konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa.

Dalam rangka mendorong pelaksanaan fungsi tersebut diperlukan desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas-tugas khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

## 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi organisasi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan adalah:

***"Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel"***

***"Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintahan"***

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam RENSTRA Badan Keuangan Dan Aset Daerah. Adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan adalah:

***"Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah"***

***"Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Aset Daerah Yang Akuntabel"***

**TABEL 4**
**TUJUAN DAN SASARAN**
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Target Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel | Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | persen | 67,50 | 69,00 | 70,50 |
| 2. | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintahan | Terwujudnya kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Aset Daerah yang Akuntabel | Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Persen | 70,00% | 72,50% | 75,00% |

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

## 4.1. Program dan Kegiatan Renja 2024

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 mencakup 3 Program 14 Kegiatan 121 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 270.925.590.752,- (dua ratus tujuh puluh milyar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan KEPMENDAGRI Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 62 (enam puluh dua) sub kegiatan sebagai berikut :

   (1). Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :

   1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
   4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
   6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

(2). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5. Sub Kegiatan Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
7. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

(3). Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
2. Sub Kegiatan Pengamanan barang milik daerah SKPD
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD
4. Sub Kegiatan Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD
5. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
6. Sub Kegiatan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
7. Sub Kegiatan Pemanfaatan barang milik daerah SKPD

(4). Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
3. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi kepegawaian
5. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
6. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
7. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
8. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

(5). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 11 (sebelas) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
8. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
9. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

11. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

(6). Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 9 (sembilan) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
4. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
6. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
7. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

(7). Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

(8). Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 9 (sembilan) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
6. Sub Kegiatan Pemeliharaan aset Tak Berwujud
7. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** terdiri dari :

(1). Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, terdiri dari 13 (tiga belas) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
4. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
5. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
6. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

7. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
8. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
9. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
10. Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
11. Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
12. Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
13. Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

(2). Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, terdiri dari 11 (sebelas) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2. Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
3. Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
4. Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah
5. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
6. Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

7. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
8. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
9. Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
10. Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
11. Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

(3). Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari 13 (tiga belas) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
2. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban
3. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
4. Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
6. Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
7. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
8. Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
9. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
10. Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
11. Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
12. Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
13. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah

(4). Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah
2. Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah
3. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
4. Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

5. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
6. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota

(5). Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Inventarisasi Dan Analisis Data Bidang Keuangan
2. Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
3. Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

3. **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH,** terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terdiri dari 13 (tiga belas) sub kegiatan antara lain :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga
2. Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
3. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
4. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
5. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah
6. Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah
7. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah
8. Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah
9. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

10. Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
11. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
12. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
13. Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seruyan. Rencana Kerja (RENJA) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, dan lokasi kegiatan.

Rumusan rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dan Pemetaan Rencana Program dan Kegiatan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada Tabel 5, 6 dan table 7 sebagai berikut :

**TABEL 5**

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU 2025**

**(PROGRAM KEGIATAN SESUAI RENSTRA UNTUK TAHUN 2024)**

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | RENCANA TAHUN 204 | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** | | | | **270.925.590.752,00** | | | | **254.276.061.000,00** |
| **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | **270.925.590.752,00** | | | | **254.276.061.000,00** |
| **6** | **KEUANGAN** | | | | **270.925.590.752,00** | | | | **254.276.061.000,00** |
| **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran** | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | **98 %** | **23.996.115.020,00** | | | **98 %** | **17.183.194.049,00** |
| 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%) | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 98 % | 300.000.000,00 | | | 98 % | 245.000.000,00 |
| 5.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 15 Dokumen | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 15 Dokumen | 50.000.000,00 |
| 5.02.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 6 Dokumen | 30.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 6 Dokumen | 25.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 6 Dokumen | 30.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 6 Dokumen | 25.000.000,00 |
| 5.02.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 6 Dokumen | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 6 Dokumen | 25.000.000,00 |
| 5.02.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 6 Dokumen | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 6 Dokumen | 30.000.000,00 |
| 5.02.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 12 Laporan | 30.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12 Laporan | 30.000.000,00 |
| 5.02.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 25 Laporan | 60.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 25 Laporan | 60.000.000,00 |
| **5.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan** | **- Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II** | **98 %** | **8.291.033.748,00** | | | **98 %** | **8.230.624.777,00** |
| 5.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | |
| | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 52 Orang/bulan | 6.617.561.248,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 52 Orang/bulan | 6.592.052.277,00 |
| 5.02.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 4 Dokumen | 1.553.472.500,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 4 Dokumen | 1.553.472.500,00 |
| 5.02.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 12 Dokumen | 25.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12 Dokumen | 20.000.000,00 |
| 5.02.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 12 Laporan | 25.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12 Laporan | 20.000.000,00 |
| 5.02.01.2.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 5 Dokumen | 25.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 5 Dokumen | 15.000.000,00 |
| 5.02.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 20 Laporan | 25.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 20 Laporan | 15.000.000,00 |
| 5.02.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 5 Dokumen | 20.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 5 Dokumen | 15.000.000,00 |
| **5.02.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD** | **- Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II** | **90 %** | **300.000.000,00** | | | **90 %** | **100.000.000,00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 5 Dokumen | 30.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 5 Dokumen | 15.000.000,00 |
| 5.02.01.2.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 5 Dokumen | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 5 Dokumen | 15.000.000,00 |
| 5.02.01.2.03.03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 12 Laporan | 35.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12 Laporan | 10.000.000,00 |
| 5.02.01.2.03.04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 12 Laporan | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12 Laporan | 15.000.000,00 |
| 5.02.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 12 Laporan | 35.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12 Laporan | 15.000.000,00 |
| 5.02.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 12 Laporan | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12 Laporan | 15.000.000,00 |
| 5.02.01.2.03.07 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 5 Dokumen | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 5 Dokumen | 15.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.02.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah** | **- Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II** | **98 %** | **1.165.000.000,00** | | | **98 %** | **560.000.000,00** |
| 5.02.01.2.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | |
| | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Unit | 30.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 1 Unit | 20.000.000,00 |
| 5.02.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | |
| | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 110 Paket | 290.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 110 Paket | 75.000.000,00 |
| 5.02.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 12 Dokumen | 25.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12 Dokumen | 20.000.000,00 |
| 5.02.01.2.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 12 Dokumen | 20.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12 Dokumen | 15.000.000,00 |
| 5.02.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 4 Dokumen | 25.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 4 Dokumen | 15.000.000,00 |
| 5.02.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | |
| | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 10 Orang | 75.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 10 Orang | 15.000.000,00 |
| 5.02.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 80 Orang | 300.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 80 Orang | 150.000.000,00 |
| 5.02.01.2.06.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | |
| | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 25 Orang | 400.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 25 Orang | 250.000.000,00 |
| **5.02.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum perangkat Daerah** | **- Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II** | **98 %** | **3.663.882.900,00** | | | **98 %** | **2.872.378.000,00** |
| 5.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | |
| | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 4 Paket | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 4 Paket | 40.000.000,00 |
| 5.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | |
| | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 8 Paket | 800.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 8 Paket | 400.000.000,00 |
| 5.02.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | |
| | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 8 Paket | 225.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 8 Paket | 150.000.000,00 |
| 5.02.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | |
| | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 8 Paket | 1.200.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 8 Paket | 986.496.000,00 |
| 5.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 4 Paket | 30.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 4 Paket | 30.000.000,00 |
| 5.02.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 12 Dokumen | 30.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12 Dokumen | 25.000.000,00 |
| 5.02.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | |
| | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 2 Paket | 20.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 2 Paket | 15.000.000,00 |
| 5.02.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 4 Laporan | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 4 Laporan | 15.000.000,00 |
| 5.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 200 Laporan | 1.188.882.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 200 Laporan | 1.188.882.000,00 |
| 5.02.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 12 Dokumen | 20.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12 Dokumen | 10.000.000,00 |
| 5.02.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 8 Dokumen | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 8 Dokumen | 10.000.000,00 |
| **5.02.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase pengadaan BMD terhadap pengadaan RKBMD** | **- Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II** | **98 %** | **6.646.063.000,00** | | | **98 %** | **725.145.000,00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | |
| | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | R4 = 3, R2 = 5 Unit | 1.926.573.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | R4 = 3, R2 = 5 Unit | 155.145.000,00 |
| 5.02.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | |
| | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 4 Unit | 1.979.480.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 4 Unit | 0,00 |
| 5.02.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | |
| | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 20 Unit | 200.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 20 Unit | 50.000.000,00 |
| 5.02.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | |
| | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 10 Unit | 200.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 10 Unit | 100.000.000,00 |
| 5.02.01.2.07.07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | |
| | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 2 Unit | 20.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 2 Unit | 10.000.000,00 |
| 5.02.01.2.07.08 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | |
| | | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 2 Unit | 20000000 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 2 Unit | 10.000.000,00 |
| 5.02.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | |
| | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Unit | 900.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 1 Unit | 200.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | |
| | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Unit | 200.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 1 Unit | 100.000.000,00 |
| 5.02.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | |
| | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Unit | 200.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 1 Unit | 100.000.000,00 |
| **5.02.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah** | **- Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II** | **98 %** | **2.370.191.272,00** | | | **98 %** | **2.330.191.272,00** |
| 5.02.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 12 Laporan | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12 Laporan | 40.000.000,00 |
| 5.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 12 Laporan | 1.132.182.504,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12 Laporan | 1.132.182.504,00 |
| 5.02.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 12 Laporan | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12 Laporan | 20.000.000,00 |
| 5.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 12 Laporan | 1.138.008.768,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12 Laporan | 1.138.008.768,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.02.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase terpeliharanya BMD SKPD** | **- Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II** | **98 %** | **2.259.955.000,00** | | | **98 %** | **2.119.955.000,00** |
| 5.02.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | |
| | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | R4 = 4, R2 =30 Unit | 306.260.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | R4 = 4, R2 =30 Unit | 306.260.000,00 |
| 5.02.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | |
| | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 18 Unit | 873.695.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 18 Unit | 873.695.000,00 |
| 5.02.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | |
| | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 20 Unit | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 20 Unit | 50.000.000,00 |
| 5.02.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | |
| | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 132 Unit | 180.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 132 Unit | 180.000.000,00 |
| 5.02.01.2.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | |
| | | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 60 Unit | 60.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 60 Unit | 50.000.000,00 |
| 5.02.01.2.09.08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | |
| | | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Unit | 40.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 1 Unit | 40.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | |
| | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 2 Unit | 150.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 2 Unit | 150.000.000,00 |
| 5.02.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | |
| | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 4 Unit | 300.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 4 Unit | 220.000.000,00 |
| 5.02.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | |
| | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 4 Unit | 300.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 4 Unit | 250.000.000,00 |
| **6.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** | | **98 %** | **246.279.475.732,00** | | | **98 %** | **236.392.856.951,00** |
| **6.02.02.2.01** | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | **Ketetapan waktu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeah (APBD)** | **- Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II** | **98 %** | **1.800.000.000,00** | | | **98 %** | **850.000.000,00** |
| 5.02.02.2.01.01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 2 Dokumen | 35.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 2 Dokumen | 35.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 2 Dokumen | 35.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 2 Dokumen | 35.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 41 Dokumen | 1.025.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 41 Dokumen | 25.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 41 Dokumen | 25.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 41 Dokumen | 25.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 41 Dokumen | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 41 Dokumen | 50.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.06 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 41 Dokumen | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 41 Dokumen | 50.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 2 Dokumen | 100.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 2 Dokumen | 100.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 2 Dokumen | 100000000 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 2 Dokumen | 110.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 2 Dokumen | 70.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 2 Dokumen | 70.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.10 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 2 Dokumen | 50.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 2 Dokumen | 50.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.12 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 2 Dokumen | 50.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.13 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 80 Orang | 150.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 80 Orang | 200.000.000,00 |
| **5.02.02.2.02** | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/Kota/Desa** | | **98 %** | **600.000.000,00** | | | **98 %** | **650.000.000,00** |
| 5.02.02.2.02.01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 40 Dokumen | 67.322.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 40 Dokumen | 67.322.000,00 |
| 5.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 40 Laporan | 38.414.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 40 Laporan | 38.598.000,00 |
| 5.02.02.2.02.03 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 40 Dokumen | 62.462.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 40 Dokumen | 66.062.000,00 |
| 5.02.02.2.02.04 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 10 Dokumen | 47.608.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 10 Dokumen | 47.608.000,00 |
| 5.02.02.2.02.05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 10 Dokumen | 48.415.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 10 Dokumen | 48.415.000,00 |
| 5.02.02.2.02.06 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 10 Dokumen | 58.222.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 10 Dokumen | 58.222.000,00 |
| 5.02.02.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 40 Laporan | 76.019.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 40 Laporan | 76.019.000,00 |
| 5.02.02.2.02.08 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 10 Dokumen | 25.634.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 10 Dokumen | 25.634.000,00 |
| 5.02.02.2.02.09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 40 Dokumen | 68.539.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 40 Dokumen | 68.539.000,00 |
| 5.02.02.2.02.10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 10 Dokumen | 53.351.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 10 Dokumen | 76.939.000,00 |
| 5.02.02.2.02.11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 120 Orang | 54.014.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 120 Orang | 76.642.000,00 |
| **5.02.02.2.03** | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel sesuai SAP atas pelaksanaan APBD dan Perda / Perbub Pertanggungjawaban APBD** | **- Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II** | **98 %** | **700.000.000,00** | | | **98 %** | **650.322.400,00** |
| 5.02.02.2.03.01 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 41 Laporan | 29.670.309,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 41 Laporan | 37.684.000,00 |
| 5.02.02.2.03.02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 41 Dokumen | 51.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 41 Dokumen | 41.288.000,00 |
| 5.02.02.2.03.03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 3 Laporan | 33.680.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 3 Laporan | 32.000.000,00 |
| 5.02.02.2.03.04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 41 Laporan | 250.993.391,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 41 Laporan | 254.000.000,00 |
| 5.02.02.2.03.05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 3 Dokumen | 107.183.500,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 3 Dokumen | 120.491.600,00 |
| 5.02.02.2.03.06 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 28 Dokumen | 48.474.800,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 28 Dokumen | 26.184.800,00 |
| 5.02.02.2.03.07 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Dokumen | 27.098.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 1 Dokumen | 24.500.000,00 |
| 5.02.02.2.03.08 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Dokumen | 9.900.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 1 Dokumen | 14.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.02.2.03.09 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 1 Dokumen | 16.000.000,00 |
| 5.02.02.2.03.10 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Dokumen | 54.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 1 Dokumen | 27.674.000,00 |
| 5.02.02.2.03.11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Orang | 66.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 1 Orang | 35.000.000,00 |
| 5.02.02.2.03.12 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 13 Lembaga | 7.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 13 Lembaga | 9.000.000,00 |
| 5.02.02.2.03.13 | Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Laporan | 5.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 1 Laporan | 7.500.000,00 |
| **6.02.02.2.04** | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **Persentase Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa** | | **98 %** | **242.879.475.752,00** | | | **98 %** | **234.092.856.961,00** |
| 5.02.02.2.04.01 | Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 |
| 5.02.02.2.04.02 | Analisis Investasi Pemerintah Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Laporan | 12.962.500.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 1 Laporan | 12.962.500.000,00 |
| 5.02.02.2.04.07 | Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 4 Laporan | 2.000.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 4 Laporan | 2.000.000.000,00 |
| 5.02.02.2.04.08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 4 Laporan | 183.789.446.370,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 4 Laporan | 201.689.464.321,00 |
| 5.02.02.2.04.09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 4 Laporan | 37.926.634.897,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 4 Laporan | 11.240.471.080,00 |
| 5.02.02.2.04.10 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 2 Laporan | 6.180.894.462,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 2 Laporan | 6.180.421.550,00 |
| **5.02.02.2.05** | **Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah** | **Cakupan Pelayanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah** | | **98 %** | **300.000.000,00** | | | **98 %** | **149.677.600,00** |
| 5.02.02.2.05.01 | Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 1 Dokumen | 7.500.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.02.2.05.02 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Dokumen | 90.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 1 Dokumen | 43.177.000,00 |
| 5.02.02.2.05.03 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | - Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 100 Orang | 200.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 100 Orang | 99.000.500,00 |
| **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **Persentase pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah** | | **98 %** | **650.000.000,00** | | | **98 %** | **700.000.000,00** |
| 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah | | 98 % | 650.000.000,00 | | | 98 % | 700.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.01 | Penyusunan Standar Harga | | | | | | | | |
| | | Jumlah Standar Harga yang Disusun | | 2 Dokumen | 40.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 2 Dokumen | 50.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.02 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik | | | | | | | | |
| | | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik | | | | | | | | |
| | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | | 2 Dokumen | 20.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 2 Dokumen | 20.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.04 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 1 Dokumen | 30.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | | 2 Laporan | 54.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 2 Laporan | 54.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | | 1 Laporan | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 1 Laporan | 50.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | | 2 Laporan | 120.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 2 Laporan | 150.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.08 | Penilaian Barang Milik Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | | 5 Laporan | 40.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 5 Laporan | 40.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.09 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | 2 Laporan | 40.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 2 Laporan | 40.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | 70 Dokumen | 96.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 70 Dokumen | 96.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.03.2.01.11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | 86 Laporan | 60.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 86 Laporan | 60.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | | 2 Laporan | 30.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 2 Laporan | 40.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | 80 Orang | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 80 Orang | 50.000.000,00 |
| J U M L A H | | | | | 270.925.590.762,00 | | | | 254.276.051.000,00 |

**TABEL 6**

**PEMETAAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DENGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA KEPMENDAGRI NOMOR : 9001.15.5-1317**

| RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 | | | | | KEPMENDAGRI NOMOR 9001.15.5-1317 TAHUN 2023 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEFIKASI | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp) | Kodefikasi: Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | | 275.925.590.752,00 | | | | | | | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | | 275.925.590.752,00 |
| 5 | URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | 275.925.590.752,00 | 5 | | | | | | KEUANGAN | | | 275.925.590.752,00 |
| 5 | KEUANGAN | | | 275.925.590.752,00 | 5 | | | | | | KEUANGAN | | | 275.925.590.752,00 |
| 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase unit kerja yang menerapkan pelayanan administrasi perkantoran | 95 % | 23.996.115.020,00 | 5 | 02 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN/KOTA | Persentase unit kerja yang menerapkan pelayanan administrasi perkantoran | 95 % | 23.996.115.020,00 |
| 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%) | 95 % | 300.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%) | 95 % | 300.000.000,00 |
| 5.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15 Dokumen | 50.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15 Dokumen | 50.000.000,00 |
| 5.02.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 6 Dokumen | 50.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 6 Dokumen | 50.000.000,00 |
| 5.02.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6 Dokumen | 50.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6 Dokumen | 50.000.000,00 |
| 5.02.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 6 Dokumen | 50.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 6 Dokumen | 50.000.000,00 |
| 5.02.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 6 Dokumen | 50.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 6 Dokumen | 50.000.000,00 |
| 5.02.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan | 50.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan | 50.000.000,00 |
| 5.02.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25 Laporan | 50.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25 Laporan | 50.000.000,00 |
| 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan | 95 % | 8.291.033.748,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan | 95 % | 8.291.033.748,00 |
| 5.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 52 Orang/bulan | 6.617.381.248,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 52 Orang/bulan | 6.617.381.248,00 |
| 5.02.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 Dokumen | 1.553.472.500,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 Dokumen | 1.553.472.500,00 |
| 5.02.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 25.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 25.000.000,00 |
| 5.02.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 Laporan | 25.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 Laporan | 25.000.000,00 |
| 5.02.01.2.02.06 | Pengaktaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 5 Dokumen | 25.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 02 | 0006 | Pengaktaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 5 Dokumen | 25.000.000,00 |

**PEMETAAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DENGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA KEPMENDAGRI NOMOR : 9001.15.5-1317**

| RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 | | | | | KEPMENDAGRI NOMOR 9001.15.5-1317 TAHUN 2023 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEFIKASI | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp) | Kodefikasi: Urusan | Bidang urusan | Program | Kegiatan | Sub kegiatan | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.02.01.2.02.37 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 Laporan | 25.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20 Laporan | 25.000.000,00 |
| 5.02.01.2.02.38 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 6 Dokumen | 20.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 6 Dokumen | 20.000.000,00 |
| **5.02.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD** | **60 %** | **300.000.000,00** | 5 | 02 | 01 | 2 | 03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD** | **60 %** | **300.000.000,00** |
| 5.02.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 5 Dokumen | 30.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 5 Dokumen | 30.000.000,00 |
| 5.02.01.2.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 5 Dokumen | 50.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 5 Dokumen | 50.000.000,00 |
| 5.02.01.2.03.03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 12 Laporan | 35.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 12 Laporan | 35.000.000,00 |
| 5.02.01.2.03.04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 60.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 03 | 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 60.000.000,00 |
| 5.02.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 35.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 35.000.000,00 |
| 5.02.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 50.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 50.000.000,00 |
| 5.02.01.2.03.07 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 5 Dokumen | 50.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 5 Dokumen | 50.000.000,00 |
| **5.02.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah** | **95 %** | **1.165.000.000,00** | 5 | 02 | 01 | 2 | 05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah** | **95 %** | **1.165.000.000,00** |
| 5.02.01.2.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | 30.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | 30.000.000,00 |
| 5.02.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 110 Paket | 290.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 110 Paket | 290.000.000,00 |
| 5.02.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 25.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 25.000.000,00 |
| 5.02.01.2.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 20.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 20.000.000,00 |
| 5.02.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 Dokumen | 25.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 Dokumen | 25.000.000,00 |
| 5.02.01.2.05.06 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | 70.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 05 | 0006 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | 70.000.000,00 |
| 5.02.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 60 Orang | 300.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 60 Orang | 300.000.000,00 |

**PEMETAAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DENGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA KEPMENDAGRI NOMOR : 9001.15.5-1317**

| RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 | | | | | KEPMENDAGRI NOMOR 9001.15.5-1317 TAHUN 2023 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEFIKASI | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp) | Kodefikasi: Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | | Sub Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.02.01.2.06.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 25 Orang | 400.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 25 Orang | 400.000.000,00 |
| **5.02.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum perangkat Daerah** | **98 %** | **3.463.882.000,00** | **5** | **02** | **01** | **2** | **06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum perangkat Daerah** | **98 %** | **3.463.882.000,00** |
| 5.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 50.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 50.000.000,00 |
| 5.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 Paket | 800.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 Paket | 800.000.000,00 |
| 5.02.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 8 Paket | 325.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 8 Paket | 325.000.000,00 |
| 5.02.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 8 Paket | 1.200.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 8 Paket | 1.200.000.000,00 |
| 5.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 30.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 30.000.000,00 |
| 5.02.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 30.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 30.000.000,00 |
| 5.02.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 3 Paket | 20.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 3 Paket | 20.000.000,00 |
| 5.02.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4 Laporan | 50.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4 Laporan | 50.000.000,00 |
| 5.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200 Laporan | 1.188.882.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200 Laporan | 1.188.882.000,00 |
| 5.02.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen | 30.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen | 30.000.000,00 |
| 5.02.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 6 Dokumen | 50.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 6 Dokumen | 50.000.000,00 |
| **5.02.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase pengadaan BMD terhadap pengadaan RKBMD** | **98 %** | **5.648.053.000,00** | **5** | **02** | **01** | **2** | **07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase pengadaan BMD terhadap pengadaan RKBMD** | **98 %** | **5.648.053.000,00** |
| 5.02.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | R4 = 3, R2 = 5 Unit | 1.926.573.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | R4 = 3, R2 = 5 Unit | 1.926.573.000,00 |
| 5.02.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4 Unit | 1.979.480.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4 Unit | 1.979.480.000,00 |
| 5.02.01.2.07.03 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 20 Unit | 200.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 07 | 0003 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 20 Unit | 200.000.000,00 |

**PEMETAAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DENGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA KEPMENDAGRI NOMOR : 9001.15.5-1317**

| RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 | | | | | KEPMENDAGRI NOMOR 9001.15.5-1317 TAHUN 2023 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEFIKASI | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp) | Kodefikasi: Urusan | Bidang urusan | Program | Kegiatan | Sub kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.02.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan | 10 Unit | 200.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan | 10 Unit | 200.000.000,00 |
| 5.02.01.2.07.07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Diadakan | 2 Unit | 20.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Diadakan | 2 Unit | 20.000.000,00 |
| 5.02.01.2.07.08 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Diadakan | 2 Unit | 20.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 07 | 0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Diadakan | 2 Unit | 20.000.000,00 |
| 5.02.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan | 1 Unit | 600.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan | 1 Unit | 600.000.000,00 |
| 5.02.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan | 1 Unit | 200.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan | 1 Unit | 200.000.000,00 |
| 5.02.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan | 1 Unit | 200.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan | 1 Unit | 200.000.000,00 |
| **5.02.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah** | **98 %** | **2.270.191.272,00** | **5** | **02** | **01** | **2** | **08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah** | **98 %** | **2.270.191.272,00** |
| 5.02.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 50.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 50.000.000,00 |
| 5.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diadakan | 12 Laporan | 1.132.182.504,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diadakan | 12 Laporan | 1.132.182.504,00 |
| 5.02.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan | 12 Laporan | 50.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan | 12 Laporan | 50.000.000,00 |
| 5.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadakan | 12 Laporan | 1.138.008.768,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadakan | 12 Laporan | 1.138.008.768,00 |
| **5.02.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase terpeliharanya BMD SKPD** | **98 %** | **2.258.955.086,00** | **5** | **02** | **01** | **2** | **09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase terpeliharanya BMD SKPD** | **98 %** | **2.258.955.086,00** |
| 5.02.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | R4 = 4, R2 =30 Unit | 308.280.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | R4 = 4, R2 =30 Unit | 308.280.000,00 |
| 5.02.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 16 Unit | 675.695.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 16 Unit | 675.695.000,00 |
| 5.02.01.2.09.03 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 20 Unit | 50.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 09 | 0003 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 20 Unit | 50.000.000,00 |
| 5.02.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 132 Unit | 180.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 132 Unit | 180.000.000,00 |
| 5.02.01.2.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 80 Unit | 80.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 80 Unit | 80.000.000,00 |
| 5.02.01.2.09.08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 Unit | 40.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 09 | 0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 Unit | 40.000.000,00 |

**PEMETAAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DENGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA KEPMENDAGRI NOMOR : 9001.15.5-1317**

| RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 | | | | | KEPMENDAGRI NOMOR 9001.15.5-1317 TAHUN 2023 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODIFIKASI | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp) | Kodifikasi: Urusan | Bidang urusan | Program | Kegiatan | | Sub kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.02.01.2.08.08 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 150.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 09 | 0008 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 150.000.000,00 |
| 5.02.01.2.08.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 300.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 300.000.000,00 |
| 5.02.01.2.08.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 300.000.000,00 | 5 | 02 | 01 | 2 | 09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 300.000.000,00 |
| **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** | **98 %** | **248.276.475.732,00** | **5** | **02** | **02** | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** | **98 %** | **248.276.475.732,00** |
| 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Ketepatan waktu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) | 98 % | 1.800.000.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 01 | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Ketepatan waktu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) | 98 % | 1.800.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 35.000.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 01 | 0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 35.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 35.000.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 35.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 41 Dokumen | 1.025.000.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 01 | 0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 41 Dokumen | 1.025.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | 41 Dokumen | 25.000.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 01 | 0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | 41 Dokumen | 25.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | 41 Dokumen | 50.000.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 01 | 0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | 41 Dokumen | 50.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.06 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | 41 Dokumen | 30.000.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 01 | 0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | 41 Dokumen | 30.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2 Dokumen | 100.000.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 01 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2 Dokumen | 100.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 Dokumen | 100.000.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 01 | 0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 Dokumen | 100.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 2 Dokumen | 70.000.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 01 | 0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 2 Dokumen | 70.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.10 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 01 | 0010 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | 2 Dokumen | 50.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 2 Dokumen | 60.000.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 01 | 0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 2 Dokumen | 60.000.000,00 |

**PEMETAAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DENGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA KEPMENDAGRI NOMOR : 9001.15.5-1317**

| RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 | | | | | KEPMENDAGRI NOMOR 9001.15.5-1317 TAHUN 2023 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEPKAS | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp) | Kodefikasi: Urusan | Bidang urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.02.02.2.01.12 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 01 | 0012 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | 2 Dokumen | 50.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.13 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 60 Orang | 160.000.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 01 | 0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 60 Orang | 160.000.000,00 |
| **5.02.02.2.02** | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/Kota/Desa** | **98 %** | **600.000.000,00** | **5** | **02** | **02** | **2** | **02** | | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/Kota/Desa** | **98 %** | **600.000.000,00** |
| 5.02.02.2.02.01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 40 Dokumen | 67.322.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 02 | 0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 40 Dokumen | 67.322.000,00 |
| 5.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 40 Laporan | 38.414.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 02 | 0002 | Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 40 Laporan | 38.414.000,00 |
| 5.02.02.2.02.03 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 40 Dokumen | 62.462.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 02 | 0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 40 Dokumen | 62.462.000,00 |
| 5.02.02.2.02.04 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | 10 Dokumen | 47.808.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 02 | 0004 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | 10 Dokumen | 47.808.000,00 |
| 5.02.02.2.02.05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 10 Dokumen | 48.415.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 02 | 0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 10 Dokumen | 48.415.000,00 |
| 5.02.02.2.02.06 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 10 Dokumen | 58.222.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 02 | 0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 10 Dokumen | 58.222.000,00 |
| 5.02.02.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Arus Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Arus Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan/Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Arus Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 40 Laporan | 79.019.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Arus Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Arus Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan/Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Arus Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 40 Laporan | 79.019.000,00 |
| 5.02.02.2.02.08 | Koordinasi Pelaksanaan Putang dan Utang Daerah yang Tinggal Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Putang dan Utang Daerah yang Tinggal Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | 10 Dokumen | 25.634.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 02 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Putang dan Utang Daerah yang Tinggal Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Putang dan Utang Daerah yang Tinggal Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | 10 Dokumen | 25.634.000,00 |
| 5.02.02.2.02.09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 40 Dokumen | 68.539.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 02 | 0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 40 Dokumen | 68.539.000,00 |
| 5.02.02.2.02.10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 10 Dokumen | 33.351.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 02 | 0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 10 Dokumen | 33.351.000,00 |

**PEMETAAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DENGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA KEPMENDAGRI NOMOR : 9001.15.5-1317**

| RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 | | | | | KEPMENDAGRI NOMOR 9001.15.5-1317 TAHUN 2023 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEFIKASI | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp) | Kodefikasi: Urusan | Bidang urusan | Program | Kegiatan | | Sub kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.02.02.2.02.11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 120 Orang | 54.014.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 02 | 0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 120 Orang | 54.014.000,00 |
| 5.02.02.2.03 | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel sesuai SAP atas pelaksanaan APBD dan Perda / Perbub Pertanggungjawaban APBD** | 98% | 700.000.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 03 | | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel sesuai SAP atas pelaksanaan APBD dan Perda / Perbub Pertanggungjawaban APBD** | 98% | 700.000.000,00 |
| 5.02.02.2.03.01 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 41 Laporan | 29.670.309,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 03 | 0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 41 Laporan | 29.670.309,00 |
| 5.02.02.2.03.02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | 41 Dokumen | 31.000.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 03 | 0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | 41 Dokumen | 31.000.000,00 |
| 5.02.02.2.03.03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 3 Laporan | 33.880.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 03 | 0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 3 Laporan | 33.880.000,00 |
| 5.02.02.2.03.04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 41 Laporan | 250.865.391,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 03 | 0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 41 Laporan | 250.865.391,00 |
| 5.02.02.2.03.05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 3 Dokumen | 107.183.500,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 03 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 3 Dokumen | 107.183.500,00 |
| 5.02.02.2.03.06 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 28 Dokumen | 48.474.600,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 03 | 0006 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 28 Dokumen | 48.474.600,00 |
| 5.02.02.2.03.07 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 1 Dokumen | 27.086.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 03 | 0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 1 Dokumen | 27.086.000,00 |
| 5.02.02.2.03.08 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 Dokumen | 9.900.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 03 | 0008 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 Dokumen | 9.900.000,00 |
| 5.02.02.2.03.09 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 03 | 0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 10.000.000,00 |
| 5.02.02.2.03.10 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 54.000.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 03 | 0010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 54.000.000,00 |
| 5.02.02.2.03.11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 1 Orang | 88.000.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 03 | 0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 1 Orang | 88.000.000,00 |
| 5.02.02.2.03.12 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina | 13 Lembaga | 7.000.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 03 | 0012 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina | 13 Lembaga | 7.000.000,00 |
| 5.02.02.2.03.13 | Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 5.000.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 03 | 0013 | Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 5.000.000,00 |

**PEMETAAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DENGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA KEPMENDAGRI NOMOR : 9001.15.5-1317**

| RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 | | | | | KEPMENDAGRI NOMOR 9001.15.5-1317 TAHUN 2023 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEPINAB | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp) | Kodefikasi: Urusan | Bidang urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.02.02.3.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa | 98 % | 242.879.475.732,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 04 | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa | 98 % | 242.879.475.732,00 |
| 5.02.02.3.04.01 | Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 04 | 0001 | Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 20.000.000,00 |
| 5.02.02.3.04.02 | Analisis Investasi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah | 1 Laporan | 12.982.500.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 04 | 0002 | Analisis Investasi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah | 1 Laporan | 12.982.500.000,00 |
| 5.02.02.3.04.07 | Penyusunan Kebijakan dan Analisis Subsidi | Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Analisis Subsidi | 4 Laporan | 2.000.000.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 04 | 0007 | Penyusunan Kebijakan dan Analisis Subsidi | Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Analisis Subsidi | 4 Laporan | 2.000.000.000,00 |
| 5.02.02.2.04.08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 4 Laporan | 183.799.446.375,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 04 | 0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 4 Laporan | 183.799.446.375,00 |
| 5.02.02.2.04.09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 4 Laporan | 37.928.934.897,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 04 | 0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 4 Laporan | 37.928.934.897,00 |
| 5.02.02.2.04.10 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | 2 Laporan | 8.180.864.462,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 04 | 0010 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | 2 Laporan | 8.180.864.462,00 |
| 5.02.02.2.06 | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Cakupan Pelayanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah | 98 % | 300.000.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 06 | | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Cakupan Pelayanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah | 98 % | 300.000.000,00 |
| 5.02.02.2.06.01 | Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 06 | 0001 | Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | 1 Dokumen | 10.000.000,00 |
| 5.02.02.2.06.02 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 1 Dokumen | 90.000.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 06 | 0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 1 Dokumen | 90.000.000,00 |
| 5.02.02.2.06.03 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 100 Orang | 200.000.000,00 | 5 | 02 | 02 | 2 | 06 | 0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 100 Orang | 200.000.000,00 |
| 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 98 % | 650.000.000,00 | 5 | 02 | 03 | | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 98 % | 650.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah | 98 % | 650.000.000,00 | 5 | 02 | 03 | 2 | 01 | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah | 98 % | 650.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.01 | Penyusunan Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 2 Dokumen | 40.000.000,00 | 5 | 02 | 03 | 2 | 01 | 0001 | Penyusunan Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 2 Dokumen | 40.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.02 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 5 | 02 | 03 | 2 | 01 | 0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | 20.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen | 20.000.000,00 | 5 | 02 | 03 | 2 | 01 | 0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen | 20.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.04 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | 5 | 02 | 03 | 2 | 01 | 0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | 30.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 2 Laporan | 54.000.000,00 | 5 | 02 | 03 | 2 | 01 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 2 Laporan | 54.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (UH) Barang Milik Daerah | 1 Laporan | 50.000.000,00 | 5 | 02 | 03 | 2 | 01 | 0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (UH) Barang Milik Daerah | 1 Laporan | 50.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 2 Laporan | 120.000.000,00 | 5 | 02 | 03 | 2 | 01 | 0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 2 Laporan | 120.000.000,00 |

**PEMETAAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DENGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA KEPMENDAGRI NOMOR : 9001.15.5-1317**

| RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 | | | | | KEPMENDAGRI NOMOR 9001.15.5-1317 TAHUN 2023 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEFIKASI | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp) | Kodefikasi: Urusan | Bidang urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.02.03.2.01.08 | Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 5 Laporan | 40.000.000,00 | 5 | 02 | 03 | 2 | 01 | 0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 5 Laporan | 40.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.09 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2 Laporan | 40.000.000,00 | 5 | 02 | 03 | 2 | 01 | 0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2 Laporan | 40.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 70 Dokumen | 99.000.000,00 | 5 | 02 | 03 | 2 | 01 | 0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 70 Dokumen | 99.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 68 Laporan | 60.000.000,00 | 5 | 02 | 03 | 2 | 01 | 0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 60 Laporan | 60.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 2 Laporan | 30.000.000,00 | 5 | 02 | 03 | 2 | 01 | 0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 2 Laporan | 30.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 60 Orang | 50.000.000,00 | 5 | 02 | 03 | 2 | 01 | 0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 60 Orang | 50.000.000,00 |
| JUMLAH | | | | 270.925.500.752,96 | | | | | | | JUMLAH | | | 270.925.500.752,96 |

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SERUYAN

**TABEL 7**

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025**

**(PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SESUAI KEPMENDAGRI NOMOR 9001.15.5-1317 TAHUN 2023**

**NAMA PERANGKAT DAERAH** : **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2024 | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** | | | | **270.926.590.752,00** | | | | **254.276.061.000,00** |
| **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | **270.926.590.752,00** | | | | **254.276.061.000,00** |
| **5** | **KEUANGAN** | | | | **270.926.590.752,00** | | | | **254.276.061.000,00** |
| **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran** | | **98 %** | **23.996.115.020,00** | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | **98%** | **17.183.194.048,00** |
| 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%) | | 96 % | 300.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 98% | 245.000.000,00 |
| 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 15 Dokumen | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 15 Dokumen | 50.000.000,00 |
| 5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 6 Dokumen | 30.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 6 Dokumen | 25.000.000,00 |
| 5.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 6 Dokumen | 30.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 6 Dokumen | 25.000.000,00 |
| 5.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 6 Dokumen | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 6 Dokumen | 25.000.000,00 |
| 5.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 6 Dokumen | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 6 Dokumen | 30.000.000,00 |
| 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 12 Laporan | 30.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12 Laporan | 30.000.000,00 |
| 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 25 Laporan | 60.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 25 Laporan | 60.000.000,00 |
| 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan | | 98 % | 8.291.033.748,00 | | | 98% | 8.230.524.777,00 |
| 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | |
| | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 52 Orang/bulan | 6.617.561.248,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 52 Orang/bulan | 6.592.052.277,00 |
| 5.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 4 Dokumen | 1.553.472.500,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 4 Dokumen | 1.553.472.500,00 |
| 5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 12 Dokumen | 25.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12 Dokumen | 20.000.000,00 |
| 5.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 12 Laporan | 25.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12 Laporan | 20.000.000,00 |
| 5.02.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 5 Dokumen | 25.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 5 Dokumen | 15.000.000,00 |
| 5.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 20 Laporan | 25.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 20 Laporan | 15.000.000,00 |
| 5.02.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 5 Dokumen | 20.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 5 Dokumen | 15.000.000,00 |
| 5.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD | | 98 % | 300.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 98% | 100.000.000,00 |
| 5.02.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 5 Dokumen | 30.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 5 Dokumen | 15.000.000,00 |
| 5.02.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 5 Dokumen | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 5 Dokumen | 15.000.000,00 |
| 5.02.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 12 Laporan | 35.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12 Laporan | 10.000.000,00 |
| 5.02.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 12 Laporan | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12 Laporan | 15.000.000,00 |
| 5.02.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 12 Laporan | 35.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12 Laporan | 15.000.000,00 |
| 5.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 12 Laporan | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12 Laporan | 15.000.000,00 |
| 5.02.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 5 Dokumen | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 5 Dokumen | 15.000.000,00 |
| 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah | | 98 % | 1.165.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 98% | 560.000.000,00 |
| 5.02.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Daiplin Pegawai | | | | | | | | |
| | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Unit | 30.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 1 Unit | 20.000.000,00 |
| 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | |
| | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 110 Paket | 290.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 110 Paket | 75.000.000,00 |
| 5.02.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 12 Dokumen | 25.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12 Dokumen | 20.000.000,00 |
| 5.02.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 12 Dokumen | 20.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12 Dokumen | 15.000.000,00 |
| 5.02.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 4 Dokumen | 25.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 4 Dokumen | 15.000.000,00 |
| 5.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | |
| | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 10 Orang | 75.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 10 Orang | 15.000.000,00 |
| 5.02.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | |
| | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 80 Orang | 300.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 80 Orang | 150.000.000,00 |
| 5.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | |
| | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 35 Orang | 400.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12 Orang | 250.000.000,00 |
| 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum perangkat Daerah | | 98 % | 3.663.882.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 98% | 2.872.378.000,00 |
| 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | |
| | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 4 Paket | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 4 Paket | 40.000.000,00 |
| 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | |
| | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 8 Paket | 800.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 8 Paket | 400.000.000,00 |
| 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | |
| | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 8 Paket | 225.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 8 Paket | 150.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | |
| | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 8 Paket | 1.200.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 8 Paket | 988.496.000,00 |
| 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | |
| | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 4 Paket | 30.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 4 Paket | 30.000.000,00 |
| 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 12 Dokumen | 30.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12 Dokumen | 26.000.000,00 |
| 5.02.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | |
| | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 2 Paket | 20.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 2 Paket | 15.000.000,00 |
| 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 4 Laporan | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 4 Laporan | 15.000.000,00 |
| 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 200 Laporan | 1.188.882.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 200 Laporan | 1.188.882.000,00 |
| 5.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 12 Dokumen | 20.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12 Dokumen | 10.000.000,00 |
| 5.02.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 8 Dokumen | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 8 Dokumen | 10.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaan BMD terhadap pengadaan RKBMD | | 98 % | 5.646.053.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 98% | 725.145.000,00 |
| 5.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | |
| | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | R4 = 3, R2 = 5 Unit | 1.926.573.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | R2 = 5 Unit | 155.145.000,00 |
| 5.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | |
| | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 4 Unit | 1.979.480.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 0 Unit | 0,00 |
| 5.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | |
| | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 20 Unit | 200.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 15 Unit | 50.000.000,00 |
| 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | |
| | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 10 Unit | 200.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 10 Unit | 100.000.000,00 |
| 5.02.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | |
| | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 2 Unit | 20.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 2 Unit | 10.000.000,00 |
| 5.02.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | |
| | | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 2 Unit | 20.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 2 Unit | 10.000.000,00 |
| 5.02.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | |
| | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Unit | 900.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 1 Unit | 200.000.000,00 |
| 5.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Unit | 200.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 1 Unit | 100.000.000,00 |
| 5.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | |
| | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Unit | 200.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 1 Unit | 100.000.000,00 |
| 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | | 98 % | 2.370.191.272,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 98% | 2.330.191.272,00 |
| 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 12 Laporan | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12 Laporan | 40.000.000,00 |
| 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 12 Laporan | 1.132.182.504,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12 Laporan | 1.132.182.504,00 |
| 5.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 12 Laporan | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12 Laporan | 20.000.000,00 |
| 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 12 Laporan | 1.138.008.768,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 12 Laporan | 1.138.008.768,00 |
| 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpeliharanya BMD SKPD | | 96 % | 2.259.955.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 96% | 2.119.955.000,00 |
| 5.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | |
| | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | R4 = 4, R2 =30 Unit | 306.260.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | R4 = 4 Unit R2 = 30 Unit Unit | 306.260.000,00 |
| 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 19 Unit | 873.695.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 18 Unit | 873.695.000,00 |
| 5.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | |
| | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 20 Unit | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 20 Unit | 50.000.000,00 |
| 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | |
| | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 132 Unit | 160.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 132 Unit | 160.000.000,00 |
| 5.02.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | |
| | | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 60 Unit | 60.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 60 Unit | 50.000.000,00 |
| 5.02.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | |
| | | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Unit | 40.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 1 Unit | 40.000.000,00 |
| 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | |
| | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 2 Unit | 150.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 4 Unit | 150.000.000,00 |
| 5.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | |
| | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 4 Unit | 300.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 4 Unit | 220.000.000,00 |
| 5.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | |
| | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 4 Unit | 300.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 2 Unit | 250.000.000,00 |
| **6.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** | | **98 %** | **246.279.475.732,00** | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | **98% 98%** | **236.392.858.951,00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rancana Anggaran Daerah | Ketetapan waktu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) | | 98 % | 1.800.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 98% | 850.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 2 Dokumen | 35.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 2 Dokumen | 35.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 2 Dokumen | 35.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 2 Dokumen | 35.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 41 Dokumen | 1.025.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 41 Dokumen | 25.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 41 Dokumen | 25.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 41 Dokumen | 25.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 41 Dokumen | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 41 Dokumen | 50.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 41 Dokumen | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 41 Dokumen | 50.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 2 Dokumen | 100.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 2 Dokumen | 100.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 2 Dokumen | 100.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 2 Dokumen | 110.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 2 Dokumen | 70.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 2 Dokumen | 70.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.0010 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 2 Dokumen | 50.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 2 Dokumen | 50.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.0012 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 2 Dokumen | 50.000.000,00 |
| 5.02.02.2.01.0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 80 Orang | 150.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 80 Orang | 200.000.000,00 |
| 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/Kota/Desa | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 98 % | 600.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 98% | 650.000.000,00 |
| 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 40 Dokumen | 67.322.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | 40 Dokumen | 67.322.000,00 |
| 5.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 40 Laporan | 38.414.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 40 Laporan | 38.598.000,00 |
| 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 40 Dokumen | 62.462.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 40 Dokumen | 66.062.000,00 |
| 5.02.02.2.02.0004 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 10 Dokumen | 47.608.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 10 Dokumen | 47.608.000,00 |
| 5.02.02.2.02.0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 10 Dokumen | 48.415.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 10 Dokumen | 48.415.000,00 |
| 5.02.02.2.02.0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 10 Dokumen | 58.222.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 10 Dokumen | 58.222.000,00 |
| 5.02.02.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 40 Laporan | 76.019.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 40 Laporan | 76.019.000,00 |
| 5.02.02.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 10 Dokumen | 25.634.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 10 Dokumen | 25.634.000,00 |
| 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 40 Dokumen | 68.539.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 40 Dokumen | 68.539.000,00 |
| 5.02.02.2.02.0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | | | | | | |
| | | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 10 Dokumen | 53.951.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 10 Dokumen | 76.939.000,00 |
| 5.02.02.2.02.0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 120 Orang | 54.014.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 120 Orang | 76.542.000,00 |
| 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel sesuai SAP atas pelaksanaan APBD dan Perda / Perbub Pertanggungjawaban APBD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 98 % | 700.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 98% | 650.522.400,00 |
| 5.02.02.2.03.0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 41 Laporan | 29.670.309,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 41 Laporan | 37.684.000,00 |
| 5.02.02.2.03.0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 41 Dokumen | 51.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 41 Dokumen | 41.288.000,00 |
| 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 3 Laporan | 33.680.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 3 Laporan | 32.000.000,00 |
| 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 41 Laporan | 250.993.391,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 41 Laporan | 254.000.000,00 |
| 5.02.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 3 Dokumen | 107.183.500,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 3 Dokumen | 125.491.600,00 |
| 5.02.02.2.03.0006 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 28 Dokumen | 48.474.600,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 28 Dokumen | 28.184.800,00 |
| 5.02.02.2.03.0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Dokumen | 27.098.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 1 Dokumen | 24.500.000,00 |
| 5.02.02.2.03.0008 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Dokumen | 9.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 1 Dokumen | 14.000.000,00 |
| 5.02.02.2.03.0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 1 Dokumen | 16.000.000,00 |
| 5.02.02.2.03.0010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Dokumen | 54.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 1 Dokumen | 27.674.000,00 |
| 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Orang | 95.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 1 Orang | 35.000.000,00 |
| 5.02.02.2.03.0012 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 13 Lembaga | 7.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 13 Lembaga | 9.000.000,00 |
| 5.02.02.2.03.0013 | Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Laporan | 5.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 1 Laporan | 7.500.000,00 |
| 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa | | 98 % | 242.879.475.732,00 | | BKAD | 98% | 234.092.856.951,00 |
| 5.02.02.2.04.0001 | Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 1 Dokumen | 20.000.000,00 |
| 5.02.02.2.04.0002 | Analisis Investasi Pemerintah Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Laporan | 12.962.500.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 1 Laporan | 12.962.500.000,00 |
| 5.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 4 Laporan | 2.000.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 4 Laporan | 2.000.000.000,00 |
| 5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 4 Laporan | 163.789.446.373,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 4 Laporan | 201.689.464.321,00 |
| 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 4 Laporan | 37.925.634.697,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 4 Laporan | 11.240.471.080,00 |
| 5.02.02.2.04.0010 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 2 Laporan | 6.180.894.462,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 2 Laporan | 6.180.421.550,00 |
| 5.02.02.2.05 | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Cakupan Pelayanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 96 % | 300.000.000,00 | | BKAD | 96% | 149.677.600,00 |
| 5.02.02.2.05.0001 | Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 1 Dokumen | 7.500.000,00 |
| 5.02.02.2.05.0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Dokumen | 90.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 1 Dokumen | 43.177.000,00 |
| 5.02.02.2.05.0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 100 Orang | 200.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 100 Orang | 99.000.600,00 |
| **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **Persentase pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah** | | **98 %** | **650.000.000,00** | | | **98%**<br>**98%** | **700.000.000,00** |
| 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah | | 98 % | 650.000.000,00 | | BKAD | 98% | 700.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Standar Harga yang Disusun | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 2 Dokumen | 40.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 2 Dokumen | 50.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 1 Dokumen | 20.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 2 Dokumen | 20.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 2 Dokumen | 20.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 1 Dokumen | 30.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 2 Laporan | 54.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 2 Laporan | 54.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 1 Laporan | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 1 Laporan | 50.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II | 2 Laporan | 120.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 2 Laporan | 150.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | | 5 Laporan | 40.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 5 Laporan | 40.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | 2 Laporan | 40.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 2 Laporan | 40.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | 70 Dokumen | 96.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 70 Dokumen | 96.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | 86 Laporan | 60.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 86 Laporan | 60.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | | 2 Laporan | 30.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 2 Laporan | 40.000.000,00 |
| 5.02.03.2.01.0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | 60 Orang | 50.000.000,00 | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | BKAD | 50 Orang | 50.000.000,00 |
| **J U M L A H** | | | | | **270.925.590.752,00** | | | | **254.279.051.000,00** |

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

MEGAWATI, S.E., M.A.P.
NIP. 19790527 200604 2 012

# BAB V

# PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 ini merupakan pedoman bagi Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) dalam melaksanakan program kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 – 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Seruyan serta target dan sasaran pembangunan yang ada dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan dan Aset Daerah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna serta semua pihak memiliki satu persepsi tentang rencana kerja sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

Kuala Pembuang, Agustus 2023

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**MEGAWATI, S.E., MAP.**
**NIP. 19790527 200604 2 012**